

LAPORAN KINERJA TAHUN 2020



PANGKALAN PSDKP BATAM
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

#PILARPSDKP

#Profesional Integritas Loyalitas inovAtif sineRgi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas terselesaikannya Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam yang merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk menerangkan tingkat pencapaian sasaran atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pencapaian kinerja Tahun 2020 merupakan perkembangan capaian kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pangkalan PSDKP Batam melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan serta melakukan perbaikan sistem dan strategi melalui koordinasi secara terus menerus dengan berbagai pihak untuk perbaikan kinerja selanjutnya.

Dengan adanya Laporan Kinerja Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang capaian kinerja dan permasalahan di Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta diharapkan dapat membuka pemikiran lebih kreatif dari berbagai pihak tentang bagaimana meningkatkan peran dan kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik dan tanggung jawab penyelenggaraan Negara tentu saja Laporan ini sangat terbuka terhadap saran dan masukan dalam rangka penyempurnaan dan perwujudan akuntabilitas publik.

Batam, Januari 2021

Kepala Pangkalan PSDKP Batam



Salman Mokoginta, S.St.Pi. M.Si
NIP. 19750102 200502 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari rencana tahunan 2020 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja sesuai dengan Renstra 2020-2024. Penyusunan LKj merupakan bentuk pertanggung jawaban Kepala Pangkalan PSKPD Batam kepada Direktur Jenderal PSDKP atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program atau kegiatan dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan. Disamping itu juga sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja pengawasan SDKP selama satu tahun anggaran.

Pangkalan PSDKP Batam telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2020 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya. Terdapat 15 Sasaran Stretegis (SS) Pangkalan PSKDP Batam yaitu:

1. Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas;
2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan;
3. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan;
4. Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Kapal Pengawas;
5. Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat;
6. Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan;
7. Terselenggaranya pembangunan Kapal Pengawas;

8. Terselenggaranya perawatan kapal pengawas;
9. Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas;
10. Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas;
11. Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas;
12. Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan;
13. Terselenggaranya Penyidikan TPKP;
14. Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal;
15. Tata kelola pemerintahan yang baik;

Keberhasilan atau kegagalan atas pencapaian Sasaran Strategis diperoleh berdasarkan hasil pengukuran atas kinerja yang telah dilakukan. Rata-rata Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2020 sebesar **108,29%** dengan indikator warna “**hijau**”.



Seluruh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dari masing-masing sasaran strategis Pangkalan PSDKP Batam tahun 2020 telah mencapai target yang ditetapkan. Hal ini karena kegiatan yang akan dilakukan telah disusun dan direncanakan pada awal tahun, sehingga pelaksanaan

kegiatan pada tahun berjalan sudah mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan.

Terkait dengan pengelolaan anggaran, alokasi DIPA pada awal tahun anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 92.341.143.000,-. Kemudian pada bulan Maret 2020, mulai terjadi wabah *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang melanda Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pagu anggaran Pangkalan PSDKP Batam dipangkas untuk digunakan percepatan penanganan *COVID-19*. Pagu anggaran Pangkalan PSDKP Batam setelah diadakan beberapa revisi menjadi Rp. 53.799.214.000,-. Realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 52.405.056.179,- atau sebesar 97,41%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
1.3 Isu Aktual Pengawasan SDKP	2
1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam	3
1. Sub Bagian Tata Usaha	4
2. Seksi Sarana dan Prasarana	5
3. Seksi Operasional Pengawasan dan PP	5
1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja	6
BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA	8
2.1 Rencana Strategis 2020-2024	8
2.2 Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024	9
2.3 Sasaran Strategis	9
2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	16
3.1 Akuntabilitas Kinerja	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	18
3.2 Akuntabilitas Keuangan	69
BAB IV PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Rekomendasi	72
LAMPIRAN	
1. Renstra 2020-2024	
2. PK Revisi Terakhir	
3. Data Dukung	

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2020	13
2. Capaian Kinerja Pangkalan SDKP Batam Tahun 2020	16
3. Komponen Nilai Pembentuk IK Kapal Perikanan	27
4. Komponen Nilai Pembentuk IK UPI	29
5. Komponen Nilai Pembentuk IK Unit Budidaya	30
6. Komponen Nilai Pembentuk IK Usaha Distribusi	32
7. Target dan Capaian Kapal yang diperiksa KP	44
8. Target dan Capaian Kapal yang diperiksa <i>Speedboat</i>	46
9. Daftar kasus di Pangkalan PSDKP Batam.....	50
10. Daftar Barang Bukti di Pangkalan PSDKP Batam.....	52
11. Daftar Awak Kapal di Pangkalan PSDKP Batam	54
12. Realisasi Anggaran Tahun 2020	70
13. Efisiensi Anggaran Tahun 2020	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Wilayah Administrasi Pangkalan PSDKP Batam	6
2. Pemeriksaan Pompong Nelayan	19
3. Perangkat <i>RMC</i> Pangkalan PSKDP Batam.....	39
4. Nilai ZI Pangkalan PSKDP Batam	62
5. Indeks IP ASN	63
6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja	66
7. Grafik Manajemen Pengetahuan Ditjen. PSDKP	67
8. Formula Penilaian IKPA Tahun 2020	68
9. Capaian IKPA Pangkalan PSKDP Batam	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam (Pangkalan PSDKP Batam) merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran tersebut selanjutnya diimplementasikan melalui program/kegiatan pengawasan SDKP yang secara garis besar akan dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengawasan SDKP 2020-2024.

Pelaksanaan program/kegiatan Pengawasan SDKP hanya dapat terselenggara dengan akuntabel, efektif dan efisien jika diterapkan pengelolaan kinerja organisasi yang baik. Pengelolaan kinerja tersebut secara garis besar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Aspek-aspek tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan kinerja, dan akan menentukan keberhasilan kinerja organisasi.

Kewajiban suatu organisasi untuk melakukan pengelolaan kinerja telah diatur oleh Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai bentuk implementasi SAKIP tersebut, Pangkalan PSDKP Batam telah melakukan Pengukuran kinerja secara berkala dan melaporkannya secara rutin kepada Direktur Jenderal PSDKP.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan laporan Kinerja yaitu untuk melaporkan capaian program/kegiatan selama 3 (tiga) bulan berjalan dan sebagai bahan evaluasi atas program/kegiatan yang telah direncanakan apakah sudah sesuai dengan pencapaian yang diharapkan atau masih di bawah dari target kinerja yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan laporan ini yaitu sebagai Laporan capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Batam pada Tahun 2020.

1.3. Isu Aktual Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan

Isu aktual pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yang menuntut perlunya dilakukan pengawasan terhadap pemanfaatan SDKP, antara lain:

1. Bidang Penangkapan Ikan

- a. Masih adanya kegiatan *illegal fishing* di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI) yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA).
- b. Masih adanya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap tidak ramah lingkungan serta merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.

2. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan

- a. Adanya Eksploitasi mangrove.
- b. Kegiatan reklamasi yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir.
- c. Masih terjadinya kegiatan penangkapan Ikan Menggunakan Bahan atau Alat yang merusak (*Destructive Fishing*).
- d. Adanya tumpahan minyak yang mencemari ekosistem perairan.

1.4 Tugas dan Fungsi Pangkalan PSDKP Batam

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 33/PERMEN-KP/2016 tanggal 3 Oktober 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan SDKP mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu : penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan; pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; pelaksanaan bimbingan kepada kelompok masyarakat pengawas (pokmaswas); pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan kapal pengawas perikanan; pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Untuk mencapai tugas dan fungsi yang telah ditetapkan maka Pangkalan Pengawasan SDKP Batam menetapkan tujuan yang akan dicapai, yaitu : melindungi Sumber Daya kelautan dan perikanan dari *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan; mewujudkan ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan perundang-undangan bidang kelautan dan perikanan; mewujudkan organisasi yang taat dan tertib administrasi serta memberikan pelayanan prima.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Batam dibantu Kelompok kerja dan Satuan Pengawasan (Satwas) SDKP sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha;
2. Seksi Sarana dan Prasarana;
3. Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran;
4. 7 Satuan Pengawasan SDKP;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Penjabaran tugas dan fungsi masing-masing kelompok Lingkup Pangkalan PSDKP Batam diuraikan sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Tugas :

Melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi :

- a. Penyiapan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, dan analisis data, dan pengolahan kinerja, pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan, serta penyusunan bahan pimpinan;
- b. Penyiapan perencanaan, pengembangan, disiplin, kesejahteraan, mutasi, tata usaha sumber daya manusia aparatur serta pengelolaan jabatan fungsional tertentu;
- c. Penyiapan kordinasi dan pelaksanaan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi, tindak lanjut laporan hasil audit, manajemen risiko, dan penyusunan laporan keuangan, penatausahaan, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan dan pelaporan barang miliknegera, serta layanan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan kerumahtanggaan.

2. Seksi Sarana dan Prasarana

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pemantauan dan Operasi Armada, serta pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemantauan dan operasi armada lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Fungsi :

- a. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan, dan operasi armada pengawasan; dan
- c. Penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang infrastruktur, peran serta masyarakat dalam membantu pengawasan, operasi pusat pengendalian pengawasan, pengawakan dan logistik armada pengawasan dan operasi armada pengawasan.

3. Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran

Tugas :

Melaksanakan kegiatan hasil dari perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Direktorat Pengawasan maupun Penanganan Pelanggaran, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan pengelolaan maupun penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Fungsi:

- a. Penyiapan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan;
- b. Penyiapan pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bidang penyelenggaraan pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan; dan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan sumber daya kelautan, sumber daya perikanan dan penanganan pelanggaran bidang kelautan dan perikanan.

Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dalam melaksanakan tugas Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di wilayah Kepulauan Riau, Bangka Belitung Sumatera Selatan dan Jambi membawahi 7 (tujuh) Satuan Pengawasan (Satwas) yaitu Satwas SDKP Tanjung Pinang, Satwas SDKP Natuna, Satwas SDKP Anambas, Satwas SDKP Bangka, Satwas SDKP Belitung, Satwas SDKP Palembang dan Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat. Wilayah administratif Pangkalan Pengawasan SDKP Batam dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Wilayah Adminstratif Pangkalan PSDKP Batam

1.5 Sistematika Penyajian Laporan Kinerja

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :

a) Bab I Pendahuluan

Menguraikan secara ringkas tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, isu aktual pengawasan SDKP, serta tugas dan fungsi Pangkalan PSDKP Batam.

b) Bab II Perencanaan dan Penetapan Kinerja

Menguraikan secara ringkas tentang Perencanaan Pengawasan SDKP dan Penetapan Kinerja tahun 2020.

c) Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Menguraikan hasil pengukuran kinerja dan keuangan, evaluasi dan analisis capaian kinerja dan keuangan Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2020.

d) Bab IV Penutup

Menjelaskan kesimpulan dan merekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen. PSDKP 2015-2019 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis nasional bidang kelautan dan perikanan 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam arah kebijakan KKP 2020-2024.

Sampai saat ini, rencana strategis Ditjen. PSDKP masih dalam proses sinkronisasi dengan kebijakan KKP. Adapun proses penyusunan Renstra Ditjen. PSDKP sudah dilakukan dimulai akhir periodea renstra 2015-2019. Renstra disusun dengan menggunakan evaluasi renstra periode sebelumnya, asumsi yang dipertanggungjawabkan serta kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan Eselon I, Eselon II, Eselon III dan Eselon IV lingkup Ditjen PSDKP. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBN. Sedangkan pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal.

Adapun arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

2.2 Arah Kebijakan Ditjen PSDKP Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan Ditjen. PSDKP tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing;
2. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP;
3. Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla);
4. Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan; dan
5. Peningkatan kesadartahuan dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP.

2.3 Sasaran Strategis

Bedasarkan arah kebijakan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tersebut, ditetapkan sasaran strategis pencapaian dengan program kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan. Sasaran strategis tersebut digunakan juga untuk penyusunan rencana kerja dan perjanjian kinerja Ditjen. PSDKP, yaitu:

1. Strategis Pencapaian Kebijakan Pengembangan SDM Aparatur Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang berkualitas dan berdaya saing, dilakukan melalui:
 - a. Membangun budaya kerja Ditjen PSDKP
 - b. Mengembangkan kompetensi SDM Aparatur PSDKP
 - c. Membangun pola karir PNS Ditjen. PSDKP
 - d. Meningkatkan jumlah dan sebaran SDM Aparatur PSDKP

2. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan kelembagaan pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Membangun sarana pengawasan (kapal pengawas, speed boat dan sarana pengawasan lainnya)
 - b. Membangun infrastruktur pengawasan yang memadai
 - c. Meningkatkan pemeliharaan kapal pengawas agar siap operasional
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengawasan
3. Strategis Pencapaian Kebijakan Penguatan sinergi dengan penegak hukum di laut (TNI AL, POLRI, Bakamla), dilakukan melalui:
 - a. Operasi bersama pengawasan di laut
 - b. Pertukaran data
 - c. Penanganan tindak pidana kelautan dan perikanan
 - d. Peningkatan kapasitas SDM Pengawasan
4. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan komunikasi dengan stakeholder dan pelaku usaha kelautan dan perikanan, dilakukan melalui:
 - a. Memperkuat sinergitas dan harmonisasi pengawasan SDKP dengan Pemerintah Daerah serta lintas sektor di tingkat Pusat
 - b. Memelihara komitmen bersama dengan lembaga internasional dan regional dalam pemberantasan *IUU fishing*
 - c. Menjalankan alur pendekatan pengawasan secara komprehensif, yakni: pencegahan (*preventif*), pembinaan, represif (*ultimum remedium*).
 - d. Menerapkan metode auditing dalam pengawasan SDKP yang mengedepankan upaya perbaikan berkelanjutan terhadap temuan ketidaksesuaian bagi para pelaku usaha kelautan dan perikanan

5. Strategis Pencapaian Kebijakan Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP, dilakukan melalui:
 - a. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab
 - b. Pemberian pemahaman kepada nelayan untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - c. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam mendukung pengawasan SDKP melalui POKMASWAS
 - d. Menanamkan pengetahuan pengelolaan SDKP yang bertanggungjawab sejak dini melalui “PSDKP Mengajar”
 - e. Meningkatkan peran aktif pemuda melalui “Pemuda Pelopor Pengawasan”
 - f. Memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Pokmaswas yang berkontribusi besar

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan iktikad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang dalam periode waktu satu tahun, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk: ⁽¹⁾ Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; ⁽²⁾ Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja; ⁽³⁾ Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; ⁽⁴⁾ sebagai dasar penetapan sasaran kinerja, pemberian penghargaan dan sanksi pegawai.

Pada tahun 2020, Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam mengalami beberapa kali revisi. Perjanjian Kinerja yang awal ditandatangani yaitu pada bulan Maret dengan 8 Sasaran Strategis dan 30 Indikator Kinerja Utama. Kemudian dilakukan revisi pertama pada bulan Mei, adapun revisinya adalah menghapuskan IKU **“Jumlah Kapal yang dibangun”** dan **“Jumlah Speedboat yang dibangun”** dikarenakan adanya pengurangan pagu alokasi anggaran yang sedianya akan digunakan untuk penanganan *COVID-19* sehingga kontrak pembangunan kapal pengawas menjadi *Multi-Years*. Jumlah Sasaran Strategis pada bulan Mei menjadi 7 dengan 28 IKU. Pada bulan Agustus dilakukan revisi kembali terhadap Perjanjian Kinerja dengan menghapuskan 4 IKU dan menambahkan 2 IKU baru yaitu **“Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam”** dan **“Nilai Rekonsiliasi Kinerja”**. Dengan demikian pada bulan Agustus ada 26 IKU. Revisi yang terakhir dilakukan pada bulan November dengan perubahan pada Sasaran Strategis yang semula sebanyak 7 SS menjadi 15 SS.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2020 dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja pada periode sebelumnya. Adapun Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2020

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam [pelaku usaha]	51
3.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	1,14
5.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	0,168
6.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
7.	Terselenggaranya pembangunan kapal pengawas	7. Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Pangkalan PSDKP Batam (unit)	1
8.	Terselenggaranya perawatan kapal pengawas	8. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam (unit)	3
9.	Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas	9. Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam (unit)	13
10.	Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas	10. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	240
		11. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam (hari operasi)	117
11.		12. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	95

	Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas	13. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam (hari operasi)	25
12.	Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan	14. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (orang)	34
13.	Terselenggaranya Penyidikan TPKP	15. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
14.	Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	16. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	93
		17. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	93
15.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	18. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Batam [Indeks]	80
		19. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		20. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		21. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		22. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75
		23. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam [Indeks]	72
		24. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	90
		25. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82
		26. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Baik [88]

Pengukuran tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan dengan berpedoman pada formula penghitungan yang telah ditetapkan dalam Manual Indikator Kinerja Utama. Selanjutnya nilai capaian tersebut dihitung dengan membandingkan antara realisasi capaian yang telah diraih dengan target yang telah ditetapkan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan

Laporan Kinerja Triwulan yang didukung Aplikasi “**Kinerjaku**” yang merupakan aplikasi khusus berbasis informasi teknologi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

3.1 Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan pengelolaan kinerja pada Tahun 2020, Capaian Indikator Utama (IKU) Pangkalan PSDKP Batam meliputi 15 Sasaran Strategis (SS) dengan 26 IKU. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2020 ditabulasikan dibawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2020

Sasaran Strategis (SS)				
Indikator Kinerja Utama (IKU)		Nilai Capaian IKU		
Kode IKU	Uraian	Target 2020	Capaian 2020	%
<i>Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas (SS1)</i>				
IKU1	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	70	100	120,00
<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan (SS2)</i>				
IKU2	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam	51	57	111,76
<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan (SS3)</i>				
IKU3	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100,00
<i>Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Kapal Pengawas (SS4)</i>				
IKU4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam	1,14	1,61	120,00
<i>Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (SS5)</i>				
IKU5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam	0,168	0,35	120,00
<i>Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SS6)</i>				
IKU6	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP	70	100	120,00
<i>Terselenggaranya pembangunan Kapal Pengawas (SS7)</i>				
IKU7	Jumlah Kapal Pengawas yang dibangun lingkup Pangkalan PSDKP Batam	1	1	100,00
<i>Terselenggaranya perawatan kapal pengawas (SS8)</i>				
IKU8	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam	3	3	100,00

Sasaran Strategis (SS)				
Indikator Kinerja Utama (IKU)			Nilai Capaian IKU	
Kode IKU	Uraian	Target 2020	Capaian 2020	%
<i>Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas (SS9)</i>				
IKU9	Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam	13	13	100,00
<i>Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas (SS10)</i>				
IKU10	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas	240	381	120,00
IKU11	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP – NRI Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	117	119	101,71
<i>Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas (SS11)</i>				
IKU12	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam	95	490	120,00
IKU13	Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam	25	25	100,00
<i>Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan (SS12)</i>				
IKU14	Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	34	34	100,00
<i>Terselenggaranya Penyidikan TPKP (SS13)</i>				
IKU15	Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100,00
<i>Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal (SS14)</i>				
IKU16	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Batam	93	100	107,53
IKU17	Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam	93	100	107,53
<i>Tata kelola pemerintahan yang baik (SS15)</i>				
IKU18	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80	87,08	108,85
IKU19	Presentase pemenuhan layanan dukungan manajemen satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100,00
IKU20	Presentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100,00
IKU21	Presentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100,00
IKU22	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam	75	83,28	111,04
IKU23	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	72	73,30	101,81
IKU24	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	90	94,65	105,17
IKU25	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	82	85	103,66
IKU26	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Batam	88	94,06	106,82

Analisa dan monitoring yang digunakan pada pencapaian kinerja tahun 2020 adalah membandingkan capaian Tahun 2020 dengan Target yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Tahun 2020.

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Selama Tahun 2020 Pangkalan PSDKP Batam telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi dan analisis pada IKU1 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 1 (Terselenggaranya Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat)**, yaitu:

1) Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target (Kelompok)	Capaian (Kelompok)	Target (%)	Capaian (%)	%
IKU1	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Batam	2	3	70	100	120,00

Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2020 sudah ditindak lanjuti sebesar 100%. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Batam diperoleh dari perbandingan jumlah pengaduan/laporan Pokmaswas tentang masalah pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang sudah ditindak lanjuti dengan jumlah pengaduan/laporan Pokmaswas yang dilaporkan kepada Pangkalan PSDKP Batam. Informasi dari POKMASWAS dapat disampaikan melalui:

- a) SMS Gateway yang akan diteruskan ke UPT/ Satwas; dan
- b) Informasi langsung kepada UPT/Satwas.

Kemudian Pangkalan PSDKP Batam akan melakukan tindak lanjut informasi dari POKMASWAS melalui pelaksanaan:

- a) Melakukan patroli baik menggunakan kapal pengawas maupun *speedboat*; dan
- b) Melakukan mengumpulkan data (pemanggilan, BAP, wawancara dll).

Pada bulan Juli tahun 2020, Ketika dilaksanakan monitoring dan evaluasi pembinaan POKMASWAS Karang Mas yang berada di Desa Tanjung Setelung Kecamatan Serasan Kabupaten Natuna didapatkan informasi tentang kegiatan *Destructive Fishing* di Sekitar Natuna. Dilaporkan ada beberapa kapal kecil /pompong yang sering melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan *Potasium* sebagai obat bius.

Pangkalan PSDKP Batam membentuk tim untuk melaksanakan tindak lanjut atas informasi POKMASWAS tersebut dengan melaksanakan patroli *Speedboat*. Pada saat patroli dijumpai 2 kapal kecil/pompong yang sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan. Pompong pertama diperiksa pada koordinat 4°11,074'N - 108°0,426'E. Pada saat dilakukan pemeriksaan diatas pompong ditemukan botol yang berisi *Potasium*. Kemudian pada pompong kedua diperiksa pada koordinat 4°11,415'N - 108°1,304'E yang ditemukan ikan hidup yang diindikasi dari hasil kegiatan penangkapan menggunakan *Potasium*.



Gambar 2. Pemeriksaan Pompong Nelayan

Pada tahun 2019 jumlah kelompok POKMASWAS yang aktif sebanyak 3 kelompok dari target 2 kelompok. Terdapat perbedaan penilaian Indikator Kinerja antara tahun 2019 dengan tahun 2020. Tahun 2019 Indikatornya adalah jumlah kelompok POKMASWAS yang aktif membantu pengawasan SDKP, sedangkan tahun 2020 indikatornya adalah Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

Anggaran tahun 2020 untuk tindak lanjut informasi POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp. 12.600.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 5.120.800,- atau 40,64%.

Evaluasi dan analisis pada IKU2 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 2** (***Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan***), yaitu:

2) Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU2	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam	70	71	51	57	111,76

Jumlah pelaku usaha kelautan yang diriksa kepatuhannya diperoleh dari perhitungan 6 komponen pembentuk sebagai berikut:

$$Xk = X_{kk} + X_{id} + X_{pjk} + X_{pppk} + X_{prl1} + X_{df}$$

Keterangan:

Xk = Jumlah Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan

X_{kk} = Jumlah pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan yang diperiksa

X_{id}	=	Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa
X_{pjk}	=	Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa
X_{pppk}	=	Jumlah pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa
X_{prl1}	=	Jumlah pelaku usaha pengelolaan ruang laut yang diperiksa
X_{df}	=	Jumlah pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pelarangan destructive fishing yang diperiksa

Sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Xk = 9 + 2 + 20 + 7 + 9 + 10$$

$$Xk = 57$$

Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya tahun 2020 adalah 57 pelaku usaha yang terbentuk dari:

a). Pengawasan Kawasan Konservasi yang dikelola serta pelaku usaha pengelolaan mangrove dan terumbu karang yang diperiksa terhadap ketentuan perundang-undangan tahun 2020 sebanyak 9 pelaku usaha. Adapun rinciannya yaitu pengawasan 1 wilayah konservasi di Anambas, Pengawasan mangrove 3 di Moro, 1 di Banyuasin, 2 di Tanjung Balai Karimun, 1 di Bintan dan 1 di Batam.

Pada tahun 2019 pengawasan mangrove termasuk kedalam komponen pengawasan WP3K. Capaian pada tahun 2019 adalah 13 pelaku usaha, antara lain 3 pelaku usaha di Batam, 4 pelaku usaha di Anambas, 3 pelaku usaha di Bintan, 2 pelaku usaha di Tanjung Balai Karimun dan 1 pelaku usaha di Moro. Kemudian juga dilakukan pengawasan 1 wilayah konservasi di Anambas.

Pagu anggaran untuk operasional Pengawasan Kawasan Konservasi yang dikelola serta pelaku usaha pengelolaan mangrove dan terumbu karang pada tahun 2020 sebesar Rp. 43.165.000,-. Dari anggaran tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 36.403.000,- atau 84,33%.

- b) Jumlah pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP Batam diperoleh dari hasil kegiatan pengawasan dengan lokasi di Anambas dan Tanjungpinang. Pada tahun 2020 dilaksanakan 2 pengawasan ikan dilindungi yaitu penyu di Pulau Beralas Bintan serta ikan Napoleon di Anambas.

Sedangkan pada tahun 2019 dilakukan pengawasan 4 jenis ikan dilindungi. Adapun lokasi pengawasan yaitu pengawasan ikan napoleon di Anambas, kepiting dan rajungan di Tanjungpinang serta penyu di Batam.

Adapun anggaran tahun 2020 untuk pengawasan usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP sebesar Rp. 22.580.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 20.906.800,- atau 92,59%.

- c) Jumlah pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2020 sebanyak 20 pelaku usaha. Produk kelautan yang dimaksud disini yaitu pasir laut. Lokasi yang menjadi target pengawasan yaitu di daerah Bangka dan disekitar Batam. Sedangkan yang termasuk dalam jasa kelautan adalah BMKT dan Wisata Bahari. Untuk BMKT lokasi tersebar di daerah Bangka, Belitung, Palembang, Natuna, Batam dan untuk daerah pengawasan Wisata bahari di Bangka, Belitung, Tanjung Pinang dan Batam.

Capaian pengawasan wisata bahari tahun 2020 yaitu sebanyak 8 pelaku usaha di Bintan, 3 pelaku usaha di Bangka dan 2 pelaku usaha di Belitung. Sedangkan pengawasan pasir laut sebanyak 1 pelaku usaha di Bangka dan 2 pelaku usaha di

Tanjung Balai Karimun serta pengawasan BMKT sebanyak 2 pelaku usaha di Bangka, 1 pelaku usaha di Belitung dan 1 pelaku usaha di Bintan. Selain itu 1 kegiatan PULBAKET BMKT di Palembang.

Pada tahun 2019 kegiatan pengawasan jasa kelautan mendapat target 24 pelaku usaha dan tercapai 23 pelaku usaha. Adapun capaiannya yaitu, pengawasan BMKT 1 pelaku usaha di Tobali dan 1 pelaku usaha 1 Museum Bahari Bintan, pengawasan wisata bahari 14 pelaku usaha di Bintan dan 3 pelaku usaha di Batam serta pengawasan pasir laut 2 pelaku usaha di Bintan, 1 pelaku usaha di Batam dan 1 pelaku usaha di Tanjung Balai Karimun.

Pagu anggaran untuk operasional pengawasan jasa kelautan pada tahun 2020 sebesar Rp. 150.725.000,-. Dari anggaran tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 134.735.000,- atau 89,39%.

- d) Pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2020 sebanyak 7 pelaku usaha. Target daerah pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir disekitar Batam dan Tanjung Pinang. Sedangkan pengawasan pulau-pulau kecil di daerah Batam, Tanjung Pinang, Anambas dan Natuna. Adapun lokasi pengawasan Pengawasan Pulau-Pulau Kecil yaitu 1 pelaku usaha di Moro, 2 pelaku usaha di Bintan dan 2 pelaku usaha di Anambas serta Pengawasan 1 pelaku usaha wilayah pesisir dengan kegiatan reklamasi di Tanjung Balai Karimun dan 1 pelaku usaha di Batam

Tahun 2019 dilakukan pengawasan pulau-pulau kecil sebanyak 11 pelaku usaha dengan lokasi 2 pelaku usaha di Anambas, 6 pelaku usaha di Bintan, 3 pelaku usaha di Batam serta pengawasan wilayah pesisir sebanyak 2 pelaku usaha di Bintan.

Pagu anggaran untuk Jumlah Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang patuh lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2020 sebesar Rp. 64.100.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 52.907.900,- atau 82,54%.

- e) Pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang patuh dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2020 sebanyak 9 Pelaku usaha. Pengawasan Pengelolaan Limbah Pelaku usaha perikanan sebanyak Pengawasan perairan akibat pencemaran 2 pelaku usaha di Sumatera Selatan, 4 pelaku usaha di Bintan, 2 pelaku usaha di Batam dan 1 pelaku usaha di Bangka. Pengolahan limbah terdiri 2 komponen pembentuk yaitu pengawasan unit UPI dan unit non UPI yang berpotensi melakukan pencemaran perairan. Pada tahun 2019 dilakukan 6 pengawasan ruang laut dengan rincian 5 pelaku usaha di Batam dan 1 pelaku usaha di Bintan.

Alokasi anggaran untuk operasional pengawasan pencemaran perairan pada tahun 2020 yaitu Rp. 44.330.000,-. Realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 43.810.300,- atau 98,83%.

- f) Jumlah pelaku usaha perikanan yang patuh dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 10 pelaku usaha kegiatan penangkapan ikan 7 pelaku usaha di Natuna dan 3 pelaku usaha di Bintan. Pada tahun 2019 dilakukan pengawasan DF sebanyak 16 pelaku usaha yang bebas dari kegiatan DF. Alokasi anggaran untuk operasional pengawasan DF pada tahun 2020 sebesar Rp. 82.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 66.244.000,- atau 80,79%.

Sebagian besar target dan capaian kegiatan pengawasan sumber daya kelautan pada tahun 2020 mengalami perubahan jika dibandingkan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran untuk pengawasan sumber daya

kelautan Pangkalan PSKDP Batam pada tahun 2020, jika sebelumnya pada tahun 2019 alokasi anggaran sebesar Rp. 825.000.000,- dan pada tahun 2020 menjadi Rp. 406.900.000,-. Namun untuk realisasi anggaran pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu 87,25% dari sebelumnya 85,26% pada tahun 2019. Selain itu dibeberapa wilayah pada saat terjadi pandemi *COVID-19* terjadi pembatasan kegiatan.

Evaluasi dan analisis pada IKU3 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 3** (*Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan*), yaitu:

- 3) Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target (Pelaku Usaha)	Capaian (Pelaku Usaha)	Target (%)	Capaian (%)	%
IKU3	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam	1470	1979	100	100	100,00

Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya diperoleh dari 4 komponen pembentuk sebagai berikut:

$$Xp = \frac{(Xkp + Xolh + Xbd + Xdst)}{4}$$

Keterangan:

- Xp = Persentase pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 Xkp = Persentase kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya

X_{olh} = Persentase unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 X_{bd} = Persentase unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya
 X_{dst} = Persentase usaha distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya

Sehingga dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

$$X_k = \frac{(100\% + 100\% + 100\% + 100\%)}{4}$$

$$X_k = 100\%$$

Persentase pelaku usaha perikanan yang diperiksa kepatuhannya sampai tahun 2020 adalah 100% yang terbentuk dari 4 komponen berikut:

- a) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP Batam sejumlah 1960 kapal perikanan. Pada tahun 2020, capaian Komponen “*presentase unit usaha kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya*” mencapai 100%. Kapal perikanan yang diawasi yaitu kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan, kecuali kapal pengangkut hasil budidaya/ikan hidup. Pencapaian ini diraih melalui kegiatan antara lain: pemeriksaan kapal perikanan saat keberangkatan yang diterbitkan HPK Keberangkatan, pemeriksaan kapal perikanan saat melakukan kegiatan perikanan (penangkapan atau pengangkutan) dalam hal ini pengawas perikanan dapat dilibatkan dalam kegiatan operasi kapal pengawas dan pemeriksaan kapal perikanan saat kedatangan kapal yang diterbitkan HPK Kedatangan. Pemeriksaan kapal perikanan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 12/PER-DJPSPDKP/2012 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan dan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor KEP.350/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Menghentikan, Memeriksa, Membawa dan

Menahan Kapal oleh Kapal Pengawas Perikanan. Adapun presentase kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya diperoleh dari:

$$X_{kp} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- X_{kp} = Persentase kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
 X = Hasil pemeriksaan kapal perikanan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)
 n = Jumlah kapal perikanan yang diperiksa (unit)

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan setiap melakukan pemeriksaan 1 unit kapal perikanan, sebagaimana tabel 3 di bawah:

Tabel 3. Komponen Nilai Pembentuk IK Kapal Perikanan yang Diperiksa

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN baik <i>Online</i> dan/ atau <i>Offline</i>	0,25	
Jumlah Nilai		1	

Capaian pengawasan kapal perikanan pada tahun 2020 lebih tinggi dari pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 capaian sebanyak 1960 kapal perikanan dan tahun 2019 sebanyak 1861 kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya.

Untuk Pagu Pengawasan kapal perikanan dianggarkan sebesar Rp. 310.576.000,- kemudian di revisi menjadi Rp. 333.656.000,- Realisasi anggaran tahun 2020 mencapai 85,16% atau sebesar Rp 284.152.607,-.

- b) Jumlah UPI yang diperiksa lingkup Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2020 adalah 41 pelaku usaha dengan rincian 7 pelaku usaha di Bangka, 14 pelaku usaha

di Palembang, 4 pelaku usaha di Natuna, 1 pelaku usaha di Batam, 1 pelaku usaha di Belitung, 2 pelaku usaha di Moro, 3 pelaku usaha di Tanjung Balai Karimun, 2 pelaku usaha di Bintan, 4 pelaku usaha di Tanjung Jabung Barat dan 3 pelaku usaha di Anambas. Pemeriksaan Unit Pengolahan Ikan mengacu pada Surat Edaran Nomor 35625/DJPSDKP/IX/2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan di Bidang Usaha Pengolahan Ikan. Capaian komponen *“Presentase unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam”* tahun 2020 adalah 100%. Presentase tersebut diperoleh dari:

$$X_{olh} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- X_{olh} = Persentase penyelesaian pemeriksaan usaha pengolahan ikan (%)
 X = Hasil pemeriksaan unit pengolahan ikan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)
 n = Jumlah usaha pengolahan ikan yang diperiksa (unit)

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan setiap melakukan pemeriksaan 1 unit usaha pengolahan perikanan, sebagaimana tabel 4 di bawah:

Tabel 4. Komponen Pembentuk Nilai IK UPI yang Diperiksa

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Administrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN baik <i>Online</i> dan/atau <i>Offline</i>	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian pengawasan usaha pengolahan ikan pada tahun 2020 mengalami kenaikan dari pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 capaian sebanyak 41 pelaku usaha dan tahun 2019 sebanyak 36 pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya. Tahun 2020 pengawasan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dianggarkan sebesar Rp. 41.520.000,- yang kemudian direvisi menjadi Rp. 33.520.000,- Realisasi anggaran pada pengawasan unit usaha pengolahan hasil perikanan adalah Rp. 31.517.300,- atau 94,03%.

- c) Jumlah Unit Usaha Budidaya Ikan (UBI) yang diperiksa sejumlah 38 pelaku usaha yang terdiri dari 30 unit usaha budidaya ikan dan 8 unit usaha kapal pengangkut ikan hidup hasil budidaya. Adapun rincian unit usaha budidaya yaitu 9 pelaku usaha di Batam, 4 pelaku usaha di Palembang, 2 pelaku usaha di Moro, 4 pelaku usaha di Anambas, 5 pelaku usaha di Tanjung Balai Karimun, 11 pelaku usaha di Bintan, 5 pelaku usaha di Tanjung Jabung Barat, 5 pelaku usaha di Belitung dan 1 pelaku usaha di Bangka. Pemeriksaan Unit usaha Budidaya Ikan mengacu pada Keputusan Dirjen PSDKP Nomor: 154/DJ-PSDKP/V/2010 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Usaha Budidaya dan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 13/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Pengangkut

Ikan Hidup. Untuk kapal ikan hidup indikatornya berupa diterbitkannya HPK Keberangkatan dan HPK Kedatangan. Capaian Komponen pembentuk “Presentase unit usaha budidaya ikan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSKDP Batam” tahun 2020 adalah 100%. Presentase tersebut diperoleh dari:

$$X_{bd} = \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

- X_{bd} = Persentase unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya (%)
- X = Hasil unit usaha pembudidayaan ikan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)
- n = Jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa (unit)

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan setiap melakukan pemeriksaan 1 unit pembudidaya ikan, sebagaimana table 5 di bawah:

Tabel 5. Komponen Pembentuk Nilai IK Unit Budidaya yang Diperiksa

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN baik <i>Online</i> dan/ atau <i>Offline</i>	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian pengawasan unit budidaya pada tahun 2020 mengalami perubahan dari pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 capaian sebanyak 38 pelaku usaha dan tahun 2019 sebanyak 53 pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya. Penilaian kinerja

pada pengawasan unit budidaya perikanan tahun 2020 terdapat 2 komponen yaitu Unit Budidaya Perikanan dan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Hasil Budidaya.

Pada tahun 2020 pagu anggaran untuk pengawasan unit usaha budidaya perikanan sebesar Rp. 118.400.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 110.800.000,- Realisasi unit usaha budidaya ikan yang terawasi terhadap peraturan perundang-undangan sebesar Rp. 89.634.258,- atau 80,90%.

d) Jumlah usaha distribusi hasil perikanan yang patuh sejumlah 25 pelaku usaha dengan rincian 3 pelaku usaha di Bangka, 4 pelaku usaha di Bintan, 2 pelaku usaha di Moro, 1 pelaku usaha di Tanjung Balai Karimun, 6 pelaku usaha di Batam, 2 pelaku usaha di Palembang, 3 pelaku usaha di Belitung dan 4 pelaku usaha di Bangka. Pemeriksaan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 14/PER-DJPSPDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/PER-DJPSPDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan. Capaian Komponen “*presentase unit usaha distribusi perikanan yang diperiksa kepatuhannya*” tahun 2020 adalah 100%. Presentse tersebut diperoleh dari:

$$= \sum_{i=1}^n \frac{(X_1 + X_2 + \dots + X_n)}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

X_{dst} = Persentase unit usaha distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya (%)

X = Hasil unit usaha distribusi hasil ikan sesuai dengan kriteria/tahapan pemeriksaan (nilai)

n = Jumlah unit usaha distribusi hasil perikanan yang diperiksa (unit)

Tahapan pemeriksaan dilakukan oleh Pengawas Perikanan setiap melakukan pemeriksaan 1 unit usaha distribusi hasil perikanan, sebagaimana tabel 6 di bawah:

Tabel 6. Komponen Pembentuk Nilai IK Usaha Distribusi yang Diperiksa

No	Tahapan Pemeriksaan	Nilai	Output
1	SPT	0,25	Dokumen SPT
2	Pemeriksaan Adminstrasi	0,25	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Pemeriksaan Kelayakan teknis	0,25	
4	Pelaporan melalui SIMWASKAN baik <i>Online</i> dan/ atau <i>Offline</i>	0,25	Laporan hasil pemeriksaan
Jumlah Nilai		1	

Capaian pengawasan unit distribusi pada tahun 2020 mengalami perubahan dari pada tahun 2019. Untuk tahun 2020 capaian sebanyak 25 pelaku usaha dan tahun 2019 sebanyak 29 pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya.

Pada tahun 2020 unit usaha distribusi pagu yang dianggarkan sebesar Rp. 55.949.000,-. Kemudian direvisi menjadi Rp. 48.469.000,-. Realisasi anggarannya tahun 2020 untuk pengawasan usaha distribusi sebesar Rp. 46.960.800,- atau 96,89%.

Sebagian besar kegiatan pengawasan sumber daya perikanan pada tahun 2020 mengalami perubahan dibandingkan tahun 2019. Hal ini dikarenakan adanya pengurangan anggaran, jika sebelumnya pada tahun 2019 alokasi anggaran untuk pengawasan sumber daya perikanan sebesar Rp. 622.220.000,- dan pada tahun 2020 sebesar Rp. 526.445.000,-. Kemudian terdapat perbedaan cara penghitungan pencapaian indikator kinerja pengawasan sumber daya perikanan antara tahun 2019

dengan tahun 2020. Pada tahun 2019 indikatornya yaitu jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa, sedangkan pada tahun 2020 yaitu presentase pemeriksaan pelaku usaha perikanan. Selain itu di beberapa wilayah pada saat terjadi pandemi COVID-19 terjadi pembatasan kegiatan. Sehingga beberapa kegiatan tidak bisa terlaksana.

Evaluasi dan analisis pada IKU4 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 4** (***Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas***) yaitu:

4) Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	1,21	1,14	1,61	120,00

Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam tahun 2020 adalah 1,61%. Presentase tersebut merupakan jumlah dari presentase cakupan WPPNRI yang dipantau KP. HIU 03 sebesar 0,63%, KP. HIU 04 sebesar 0,59% dan KP. HIU 06 sebesar 0,39%. Presentase cakupan WPPNRI yang dipantau adalah presentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh kapal pengawas dalam setiap pelaksanaan operasi pengawasan terhadap luas WPPNRI. Kegiatan patroli sebagai salah satu upaya untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang bebas dari *Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU Fishing)* yaitu kegiatan perikanan yang melanggar hukum,

tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di WPPNRI.

Presentase cakupan WPPNRI yang dipantau kapal pengawas pengukurannya diperoleh dari jumlah dari perkalian antara Jangkauan pemantauan melalui radar kapal pengawas, kecepatan dinas, lama waktu pengawasan, faktor koreksi aktual WPPNRI dan faktor koreksi aktual kapal pengawas. Dari hasil perkalian tersebut dibagi dengan luas area WPPNRI keseluruhan yaitu 1.928.506 nm².

$$x = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot f_{wpp} \cdot f_{kp}}{A} \right\} \times 100\%$$

Keterangan:

x	=	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau
n	=	frekuensi operasi Kapal Pengawas
I	=	periode operasi Kapal Pengawas
D	=	jangkauan pemantauan melalui radar Kapal Pengawas (nm)
V	=	kecepatan dinas (nm/jam)
T	=	lama waktu pengawasan (jam)
f_{wp}	=	faktor koreksi aktual WPPNRI
f_{kp}	=	Faktor koreksi aktual Kapal Pengawas
A	=	Luas area WPPNRI = 1.928.506 nm ²

Dengan menggunakan rumus tersebut maka akan diperoleh presentase cakupan wilayah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 x \text{ KP HIU 03} &: \left\{ \frac{9 \times 15 \times 1000 \times 0,3 \times 0,3}{1.928.506} \right\} \times 100\% = 0,63\% \\
 x \text{ KP HIU 04} &: \left\{ \frac{9 \times 15 \times 936 \times 0,3 \times 0,3}{1.928.506} \right\} \times 100\% = 0,59\% \\
 x \text{ KP HIU 06} &: \left\{ \frac{9 \times 15 \times 936 \times 0,2 \times 0,3}{1.928.506} \right\} \times 100\% = 0,39\%
 \end{aligned}$$

Kapal pengawas HIU 03 melaksanakan operasi pengawasan sebanyak 125 hari yang melebihi dari target yaitu 117 hari operasi. Selisih hari operasi tersebut

menggunakan anggaran dari sisa BBM kapal pengawas dikarenakan adanya selisih harga antara pagu dengan harga sebenarnya. Rata – rata kapal pengawas HIU 03 beroperasi di WPP 711 bersama dengan Kapal pengawas HIU 04. Sedangkan HIU 06 rata-rata beroperasi di WPP 571.

IKU 4 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2019 karena tidak terdapat target *“Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam”*.

Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 12.145.364.000,-. Kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 11.714.831.000,- . Anggaran 2020 yang sudah terealisasi sebesar Rp. 11.554.834.943,- atau 98,63% dari pagu.

Evaluasi dan analisis pada IKU5 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 5 (Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat)** yaitu:

- 5) Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	0,391	0,168	0,350	120,00

Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* tahun 2020 adalah 0,350%. Presentase tersebut merupakan jumlah dari presentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan speedboat/RIB/rubber boat yang dioperasikan di lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Presentase cakupan WPPNRI yang dipantau adalah presentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* dalam setiap pelaksanaan operasi pengawasan terhadap luas WPPNRI. Kegiatan patroli sebagai salah satu upaya untuk menciptakan sektor kelautan dan perikanan yang bebas dari *Illegal, Unreported an Unregulated Fishing (IUU Fishing)* yaitu kegiatan perikanan yang melanggar hukum, tidak dilaporkan dan tidak diatur yang dilakukan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII) dan Kapal Ikan Asing (KIA) di WPPNRI.

Presentase cakupan WPPNRI yang dipantau *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* pengukurannya diperoleh dari jumlah dari perkalian antara Jangkauan pemantauan melalui radar *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat*, kecepatan dinas, lama waktu pengawasan, faktor koreksi aktual WPPNRI dan faktor koreksi aktual *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat*. Dari hasil perkalian tersebut dibagi dengan luas area WPPNRI keseluruhan yaitu 1.928.506 nm².

$$x_{sb} = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot f_{sb}}{A} \right\} \times 100\%$$

Keterangan :

x_{sb}	=	<i>coverage area speedboat</i> pengawas
n	=	frekuensi operasi <i>Speedboat</i> Pengawas
i	=	periode operasi <i>Speedboat</i> Pengawas
d	=	jangkauan pemantauan melalui radar/ penglihatan visual (nm)
v	=	kecepatan dinas (nm/jam)
t	=	lama waktu pengawasan (jam)
f_{sb}	=	faktor koreksi aktual <i>Speedboat</i> = 0,1
A	=	Luas area WPPNRI = 1.928.506 nm ²

Dengan menggunakan rumus tersebut maka akan diperoleh presentase cakupan wilayah sebagai berikut:

<i>X Napoleon 15</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 150 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0311%
<i>X Napoleon 16</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 125 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0259%
<i>X Napoleon 27</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 125 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0259%
<i>X Napoleon 35</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 125 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0259%
<i>X RIB-8</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 125 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0259%
<i>X Baramundi</i>	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 125 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0259%
<i>X Dolphin 08</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 125 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0259%
<i>X Dolphin 15</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 125 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0259%
<i>X Dolphin 18</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 125 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0259%
<i>X Dolphin 23</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 125 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0259%
<i>X Dolphin 24</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 145 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0301%
<i>X RB Sadai</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 125 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0259%
<i>X RB Lingga</i> :	$\left\{ \frac{4 \times 10 \times 125 \times 0,1}{1.928.506} \right\} \times 100\%$	= 0,0259%

IKU 5 tidak dapat dibandingkan dengan Tahun 2019 karena tidak terdapat target “*Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam*”.

Pagu anggaran untuk operasi *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* sebesar Rp. 1.857.256.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 1.610.140.000,- Sampai dengan tahun 2020 anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp 1.550.966.865,- atau 96,32% dari pagu anggaran.

Evaluasi dan analisis pada IKU6 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 6** (***Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan***) yaitu:

6) Presentase Kesiapan Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU6	Presentase Kesiapan Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	-	100	70	100	120,00

Persentase kesiapan sistem pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan pada 2020 adalah 100%. Nilai tersebut diperoleh dari siapnya semua perangkat yang digunakan dalam sistem pemantauan SDKP di Lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Sistem pemantauan SDKP di Pangkalan PSDKP Batam menggunakan akses internet dengan kecepatan 5 Mbps. Tersedianya Lembar Pemasangan dan Pemeriksaan Transmitter SPKP juga menjadi indikator kesiapan sistem pemantauan.

Untuk menunjang pemantauan kapal perikanan, Pangkalan PSDKP Batam memiliki sarana dan prasarana yang digunakan dalam pemantauan SDKP. Sarana dan prasarana tersebut siap digunakan dalam kegiatan pemantauan serta dalam kondisi yang baik. Sarana Pemantauan yang ada di Pangkalan PSDKP Batam merupakan pemaiban dari Direktorat Pemantauan SDKP dan PIP, yaitu:

1. Satu unit Personal Computer HP Envy i-7;

2. Satu unit Personal Computer HP Pavillon 500;
3. Satu set Perangkat Server;
4. Satu unit Printer HP M177FWFP;
5. Satu unit AC Sharp;

Kemudian prasarana yang digunakan yaitu berupa ruangan khusus operator RMC. Ruangan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pemanantaun kapal perikanan. Selain itu ruangan ini juga digunakan oleh operator untuk melakukan pelayanan pengajuan SKAT.



Gambar 3. Perangkat *Regional Monitoring Centre (RMC)* pada Pangkalan PSDKP

RMC Batam mulai dioperasikan tahun 2014 namun baru pada tahun 2017 terkoneksi dengan internet jaringan fiber optic. Untuk efektifitas pelayanan SPKP perangkat RMC yang semula berada di lantai 3 dipindahkan ke Ruang Pemantauan di lantai 1 kantor Pangkalan PSDKP Batam. Tahun 2019 tidak terdapat Indikator Kinerja “*Presentase Kesiapan Sistem Pemantauan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan*”. Namun perangkat dan operasi sistem pemantauan di Pangkalan PSDKP Batam beroperasi dengan baik.

Pada tahun 2020 anggaran untuk Sistem pemantauan SDKP di Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp. 105.000.000,- . kemudian dilakukan revisi menjadi Rp. 93.000.000,-. Tahun 2020 anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 89.770.967,- atau 96,53%.

Evaluasi dan analisis pada IKU7 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 7** (***Terselenggaranya pembangunan kapal pengawas***) adalah:

7) Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU7	Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	-	1	1	100,00

Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 1 unit kapal pengawas type C berukuran 32 meter merupakan target tahunan. Pembangunan kapal dikerjakan oleh PT. Palindo Marine yang berlokasi di Batam sebagai pemenang tender yang dilaksanakan *Multi-Years*. Progres pembangunan sampai dengan tahun 2020 sudah mencapai 80,13% mulai dari konstruksi kapal, instalasi mesin, pemasangan beberapa alat navigasi sampai dengan instalasi kelistrikan. Rencana kapal akan selesai 100% dan dilakukan serah terima ke Pangkalan PSDKP Batam pada bulan Maret 2021.

Pembangunan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam dianggarkan sebesar Rp. 43.330.860.000,-. Kemudian direvisi menjadi Rp. 16.209.918.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 15.977.962.570,- atau 98,57% dari pagu anggaran.

Evaluasi dan analisis pada IKU8 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 8** (***Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam***) adalah:

8) Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU8	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam	3	3	3	3	100,00

Jumlah kapal pengawas yang siap operasi diperoleh dari jumlah kapal pengawas dengan kondisi baik dan dapat digunakan untuk melakukan operasi pengawasan SDKP. Kapal Pengawas di lingkup PSDKP Batam yang siap operasi yaitu KP. HIU 03, KP. HIU 04 dan KP. HIU 06. Pada Tahun Anggaran 2020, terdapat pengadaan sukucadang dan perlengkapan serta overhaul dan docking Kapal Pengawas, selain itu terdapat pemeliharaan rutin dan darurat yang menunjang operasional Kapal Pengawas di Lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Kegiatan perawatan kapal pengawas yaitu *Docking* dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2020.

Target dan capaian Indikator Kinerja “*Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam*” antara tahun 2019 dan tahun 2020 sama yaitu 3 kapal pengawas yang siap operasi. Tidak terdapat perubahan kapal yang beroperasi di wilayah pengawasan Pangkalan PSDKP Batam yaitu KP. HIU 03, KP. HIU 04 dan KP. HIU 06.

Pagu anggaran tahun 2020 untuk kapal pengawas lingkup PSDKP Batam yang siap operasi sebesar Rp. 3.457.028.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 3.487.548.000,-. Selama tahun 2020 realisasi anggaran 96,36% atau sebesar Rp. 3.360.690.650,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU8 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 9** (*Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam*) adalah:

9) Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU9	Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam	14	14	13	13	100,00

Jumlah speedboat pengawas lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam yang siap beroperasi berjumlah 13 unit. Adapun penyebaran unit speedboat adalah sebagai berikut:

1. Napoleon 015 di Satwas SDKP Palembang;
2. Napoleon 016 di Satwas SDKP Natuna;
3. Napoleon 027 di Satwas SDKP Anambas;
4. Napoleon 035 di Satwas SDKP Bangka;
5. Dolpin 015 di Wilker SDKP Tanjung Balai Karimun;
6. Dolpin 018 di Satwas SDKP Tanjung Pinang;
7. Dolpin 023 di Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat;
8. Dolpin 024 di Wilker SDKP Moro;
9. Dolpin 008 di Satwas SDKP Belitung;
10. Rubber Boat di Wilker SDKP Lingga;
11. Rubber Boat di Wilker SDKP Sadai;
12. PRL/Baramundi di Pangkalan PSDKP Batam; dan
13. Rigid Inflatable Boat di Pangkalan PSDKP Batam.

Pada tahun 2019 terdapat 14 unit *Speedboat/RIB/Rubberboat* lingkup Pangkalan PSKDP Batam yang siap beroperasi. Masing-masing 1 unit RIB, 10 unit *Speedboat* dan 3 *Rubberboat*. Pada tahun 2020 terdapat 1 unit *Rubberboat* yang bereperasi di Wilker Kijang tidak dapat digunakan karena dalam kondisi rusak berat. Maka di tahun 2020 hanya terdapat 13 unit *Speedboat/RIB/Rubberboat* lingkup Pangkalan PSKDP Batam yang siap beroperasi. Kegiatan perawatan *Speedboat* pengawas yaitu *Docking* rata-rata dilaksanakan pada semester II Tahun 2020.

Anggaran tahun 2020 untuk speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp. 624.328.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 864.905.000,-. Dari anggaran tersebut, selama tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 789.570.770,- atau 91,29%.

Evaluasi dan analisis pada IKU10 dan IKU11 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 10 (*Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas*)** yaitu:

10) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU10	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas	-	259	240	381	120,00

Jumlah kapal perikanan yang diperiksa dilaut menggunakan kapal pengawas sebanyak 381 kapal perikanan. Jumlah kapal yang diperiksa dilaut adalah jumlah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat kapal pengawas melakukan kegiatan operasi pengawasan. Pada saat melakukan operasi, kapal pengawas akan memeriksa kapal perikanan yang ditemui baik Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA). Jumlah kapal yang diperiksa setiap periode berbeda-beda, tergantung wilayah

dan banyaknya kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun pengangkutan pada saat itu.

Pada tahun 2019 tidak terdapat indikator kinerja “*Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas*”. Namun selama melaksanakan operasi kapal pengawas telah melakukan pemeriksaan terhadap 259 kapal perikanan dengan rincian pada tabel 7 berikut.

Tabel 7. Target dan Capaian Kapal yang diperiksa Kapal Pengawas

No	Kapal Pengawas	2019		2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	HIU 003	-	80	80	112
2	HIU 004	-	111	80	127
3	HIU 006	-	68	80	142

Pagu anggaran untuk operasi kapal pengawas sebesar Rp. 12.145.364.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 11.714.831.000,- Selama tahun 2020 anggaran yang sudah terealisasi sebesar Rp. 11.554.834.943,- atau 98,63% dari pagu anggaran.

11) Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU11	Jumlah Hari Operasi Kapal Pengawas SDKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam	90	90	117	119	101,71

Target hari operasi kapal pengawas pada tahun 2020 adalah 117 hari operasi. Pada tahun 2020, rata-rata jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 119 hari operasi yang beroperasi di WPPNRI 711 dan WPPNRI 571 dengan Masing-masing hari operasi kapal adalah sebagai berikut:

- a). KP. HIU 03 sebanyak 125 hari operasi;
- b). KP HIU 04 sebanyak 117 hari operasi; dan
- c) KP. HIU 06 sebanyak 117 hari operasi.

Pada tahun 2019 target hari operasi tiga kapal pengawas lingkup Pangkalan PSKDP Batam sebanyak 90 hari operasi dan terpenuhi. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat penambahan target hari operasi menjadi 117 hari operasi. Dari target tersebut kapal pengawas lingkup Pangkalan PSKDP Batam rata-rata melaksanakan sebanyak 119 hari operasi.

Pagu anggaran tahun 2020 untuk operasional kapal pengawas lingkup PSDKP Batam sebesar Rp. 12.145.364.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 11.714.831.000,- tahun 2020 realisasi anggaran sebesar Rp. 11.554.834.943,- atau 98,63% yang sudah terealisasi.

Evaluasi dan analisis pada IKU12 dan IKU13 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 11 (Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas)** yaitu:

12) Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan *speedboat*

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU12	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i>	-	618	95	490	120,00

Jumlah kapal perikanan yang diperiksa dilaut menggunakan *speedboat* sebanyak 490 kapal perikanan. Semua kapal yang sudah diperiksa diperbolehkan untuk melanjutkan kegiatan karena tidak ditemukan indikasi pelanggaran. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa dilaut menggunakan *speedboat* adalah jumlah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada saat *speedboat* melakukan kegiatan operasi pengawasan. Pada

saat melakukan operasi, *speedboat* akan memeriksa kapal perikanan yang ditemui baik Kapal Ikan Indonesia (KII) maupun Kapal Ikan Asing (KIA). Jumlah kapal yang diperiksa setiap periode berbeda-beda, tergantung wilayah dan banyaknya kapal perikanan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan maupun pengangkutan.

Pada tahun 2019 tidak terdapat indikator kinerja “Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan *speedboat*”. Namun selama melaksanakan operasi *speedboat* pengawas telah melakukan pemeriksaan terhadap 618 kapal perikanan dan dapat dilihat pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Target dan Capaian Hari Operasi *Speedboat*

No	Speedboat Pengawas Perikanan	2019		2020	
		Target	Capaian	Target	Capaian
1	NAPOLEON 015	-	69	7	36
2	NAPOLEON 016	-	37	8	43
3	NAPOLEON 027	-	29	7	13
4	NAPOLEON 035	-	95	8	106
5	RIB X-8	-	94	8	31
6	PRL / <i>Baramundi</i>	-	18	8	43
7	DOLPHIN 008	-	50	7	42
8	DOLPHIN 015	-	53	7	38
9	DOLPHIN 018	-	28	7	38
10	DOLPHIN 023	-	9	7	9
11	DOLPHIN 024	-	26	7	36
12	RUBBER BOAT LINGGA	-	46	7	38
13	RUBBER BOAT SADAI	-	48	7	17

Anggaran untuk operasional speedboat pada tahun 2020 Pangkalan PSKDP Batam adalah Rp. 1.857.256.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 1.610.140.000,- Selama tahun 2020 anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.550.966.865,- Atau 96,32%.

13) Jumlah Hari operasi Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU13	Jumlah Hari operasi Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam	29	29	25	25	100,00

Target hari operasi speedboat pengawas pada tahun 2020 adalah 25 hari operasi. Selama tahun 2020, rata-rata hari operasi 13 *speedboat* lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 25 hari operasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Napoleon 015 di Satwas SDKP Palembang sebanyak 30 hari operasi;
2. Napoleon 016 di Satwas SDKP Natuna sebanyak 25 hari operasi;
3. Napoleon 027 di Satwas SDKP Anambas sebanyak 25 hari operasi;
4. Napoleon 035 di Satwas SDKP Bangka sebanyak 25 hari operasi;
5. Dolpin 015 di Wilker SDKP Tanjung Balai Karimun sebanyak 25 hari operasi;
6. Dolpin 018 di Satwas SDKP Tanjung Pinang sebanyak 25 hari operasi;
7. Dolpin 023 di Satwas SDKP Tanjung Jabung Barat sebanyak 25 hari operasi;
8. Dolpin 024 di Wilker SDKP Moro sebanyak 29 hari operasi;
9. Dolpin 008 di Satwas SDKP Belitung sebanyak 25 hari operasi.
10. Rubber Boat di Wilker SDKP Lingga sebanyak 25 hari operasi;
11. Rubber Boat di Wilker SDKP Sadai sebanyak 25 hari operasi;
12. PRL di Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 25 hari operasi; dan
13. Rigid Inflatable Boat di Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 25 hari operasi.

Pada tahun 2019 target hari operasi *speedboat* lingkup Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 29 hari operasi dan terpenuhi. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat

perubahan target hari operasi menjadi 25 hari operasi. Dari target tersebut kapal pengawas lingkup Pangkalan PSKDP Batam rata-rata melaksanakan sebanyak 25 hari operasi.

Anggaran untuk operasional speedboat pada tahun 2020 Pangkalan PSKDP Batam adalah Rp. 1.857.256.000,- kemudian direvisi menjadi Rp. 1.610.140.000,- Selama tahun 2020 anggaran yang terserap sebesar Rp. 1.550.966.865,- Atau 96,32%.

Evaluasi dan analisis pada IKU14 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 12 (Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan)** yaitu:

- 14) Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU14	Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	34	34	34	100,00

Pemeriksaan kesehatan rutin adalah kegiatan setiap tahun yang dilakukan untuk mengetahui kesehatan setiap Awak Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSKDP Batam agar tetap bugar dan sehat baik fisik maupun mental melalui program Medical Check Up. Jumlah awak kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang diperiksa kesehatannya adalah 34 awak kapal yang merupakan awak dari KP. HIU 03, KP. HIU 04 dan KP. HIU 06.

Tahun 2019 tidak terdapat indikator kinerja “*Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Batam*”. Namun seluruh awak kapal pengawas yang berjumlah 34 dilakukan pemeriksaan kesehatan sebelum melaksanakan kegiatan operasi pengawasan.

Pagu anggaran untuk Medical Check Up Bagi Awak Kapal Pengawas sebesar Rp. 48.600.000,-. Dari anggaran tersebut terealisasi sebanyak 94,44% atau sebesar Rp. 45.900.000,-.

Evaluasi dan analisis pada IKU15 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 13** (***Terselenggaranya Penyidikan bidang Kelautan dan Perikanan***) yaitu:

15) Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target (Kasus)	Capaian (Kasus)	Target (%)	Capaian (%)	%
IKU15	Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam	28	28	100	100	100,00

Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam diukur dengan membandingkan antara jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani sampai dengan tahap P-21 (berkas perkara dinyatakan lengkap) tahap I dengan jumlah tindak pidana kelautan dan perikanan yang terjadi sampai dengan 1 bulan sebelum bulan berjalan yang telah diterbitkan SPDP dan SPRINDIK. Pangkalan

PSDKP Batam tahun 2020 telah menangani 35 kasus dengan 31 kasus di Batam, 3 Kasus di Natuna dan 1 kasus di Tanjung Balai Karimun. Adapun daftar kasus sebagai tabel 9 berikut.

Tabel 9. Daftar Kasus di Pangkalan PSDKP Batam

No	Nama Kapal	Nama Tersangka	Jabatan Awak Kapal	Bendera Kapal
1	KM. KG 94376 TS	Le Van Tung	Nahkoda	Vietnam
2	KM. KG 94376 TS	Tran Van Can	KKM	Vietnam
3	KM. KG 95786 TS	Nguyen Van Phuong	Nahkoda	Vietnam
4	KM. KG 95786 TS	Huynh Hoai Ngoc	KKM	Vietnam
5	KM. PAF 4837	Tran Xuan Dung	Nahkoda	Vietnam
6	KM. PAF 4837	Nguyen Thanh Hanh	KKM	Vietnam
7	KM. PAF 4696	Do Thanh Nhan	Nahkoda	Vietnam
8	KM. PAF 4696	Nguyen Tuan Dat	KKM	Vietnam
9	KM. KG 94654 TS	Tran Thanh Hoa	Nahkoda	Vietnam
10	KM. KG 94654 TS	Tang An Toan	KKM	Vietnam
11	KM. PKFB 422	Maung Lwin	Nahkoda	Malaysia
12	KM. KG 93811 TS	Tran Van Trung	Nahkoda	Vietnam
13	KM. KG 93012 TS	Luong Hoang Anh	Nahkoda	Vietnam
14	KM. BV 92475 TS	Le Van Thuan	Nahkoda	Vietnam
15	KM. BV 93128 TS	Ngo Van Hoa	Nahkoda	Vietnam
16	KM. PK 3853 F	Moe Zaw	Nahkoda	Malaysia
17	KM. SLFA 2030	Tung Tan	Nahkoda	Malaysia
18	KM. SLFA 4429	Nyane Thu Yawin	Nahkoda	Malaysia
19	KM. BD 30942 TS	Nguyen Van Hoan	Nahkoda	Vietnam
20	KM. BD 30919 TS	Nguyen Van Phung	Nahkoda	Vietnam
21	KM. KG 94094 TS	Ngo Van Dung	Nahkoda	Vietnam
22	KM. KG 90746 TS	Nguyen Van Quyen	Nahkoda	Vietnam

23	KM. PKFA 8777	Yelwin Oo	Nahkoda	Malaysia
24	KM. KG 95551 TS	Le Thanh Sang	Nahkoda	Vietnam
25	KM. KG 95572 TS	Nguyen Huu Phuoc	Nahkoda	Vietnam
26	KM. TG 9481 TS	Lam Van Trung	Nahkoda	Vietnam
27	KM. TG 9437 TS	Lam Van Toan	Nahkoda	Vietnam
28	KM. PKFB 423	Heng Peng Yu	Nahkoda	Malaysia
29	JHF 5183 T	NURDIN	Nahkoda	Malaysia
30	KM. TG 9583 TS	Pham Van Den	Nahkoda	Vietnam
31	KM. TG 9489 TS	Le Van Hoang	Nahkoda	Vietnam
32	KM. KF 5152	Zaw Tun	Nahkoda	Vietnam
33	BV 99793 TS	Tran Tan Than	Nahkoda	Vietnam
34	BV 97878 TS	Dinh Minh Chi	Nahkoda	Vietnam
35	BT 95212 TS	Nguyen Thanh Duc	Nahkoda	Vietnam

Tahun 2019 jumlah kasus yang disidik lingkup Pangkalan PSDKP Batam sebanyak 28 kasus. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami penambahan menjadi 35 kasus. Sebagian besar kapal ikan asing yang tertangkap beroperasi di WPPNRI 711 Laut Natuna yang berbendera Vietnam dengan alat tangkap *trawl*. Kasus-kasus tersebut sudah selesai P21 tahap I maupun tahap II.

Pada tahun 2020 pagu anggaran untuk penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp 775.825.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 751.690.000,-. Dari Anggaran tersebut terserap sebesar Rp. 711.851.685,- atau 94,70%

Evaluasi dan analisis pada IKU16 dan IKU17 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 14 (Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal)** yaitu:

16) Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target (Kasus)	Capaian (Kasus)	Target (%)	Capaian (%)	%
IKU16	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Batam	28	28	93	100	107,53

Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Batam diukur dengan membandingkan antara jumlah barbuk tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani sampai dengan penyerahan tahap II ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan jumlah barbuk tindak pidana kelautan dan perikanan yang terjadi sampai dengan 1 bulan sebelum bulan berjalan yang telah diterbitkan SPDP dan SPRINDIK. Selama tahun 2020, kasus yang ditangani lingkup Pangkalan PSDKP Batam sudah selesai tahap II sebagai Tabel 10 berikut.

Tabel 10. Daftar Barang Bukti di Pangkalan PSDKP Batam

No	Barang Bukti	Nama Tersangka	Bendera Kapal
1	KM. KG 94376 TS	Le Van Tung	Vietnam
2	KM. KG 94376 TS	Tran Van Can	Vietnam
3	KM. KG 95786 TS	Nguyen Van Phuong	Vietnam
4	KM. KG 95786 TS	Huynh Hoai Ngoc	Vietnam
5	KM. PAF 4837	Tran Xuan Dung	Vietnam
6	KM. PAF 4837	Nguyen Thanh Hanh	Vietnam
7	KM. PAF 4696	Do Thanh Nhan	Vietnam
8	KM. PAF 4696	Nguyen Tuan Dat	Vietnam
9	KM. KG 94654 TS	Tran Thanh Hoa	Vietnam
10	KM. KG 94654 TS	Tang An Toan	Vietnam
11	KM. PKFB 422	Maung Lwin	Malaysia

12	KM. KG 93811 TS	Tran Van Trung	Vietnam
13	KM. KG 93012 TS	Luong Hoang Anh	Vietnam
14	KM. BV 92475 TS	Le Van Thuan	Vietnam
15	KM. BV 93128 TS	Ngo Van Hoa	Vietnam
16	KM. PK 3853 F	Moe Zaw	Malaysia
17	KM. SLFA 2030	Tung Tan	Malaysia
18	KM. SLFA 4429	Nyane Thu Yawin	Malaysia
19	KM. BD 30942 TS	Nguyen Van Hoan	Vietnam
20	KM. BD 30919 TS	Nguyen Van Phung	Vietnam
21	KM. KG 94094 TS	Ngo Van Dung	Vietnam
22	KM. KG 90746 TS	Nguyen Van Quyen	Vietnam
23	KM. PKFA 8777	Yelwin Oo	Malaysia
24	KM. KG 95551 TS	Le Thanh Sang	Vietnam
25	KM. KG 95572 TS	Nguyen Huu Phuoc	Vietnam
26	KM. TG 9481 TS	Lam Van Trung	Vietnam
27	KM. TG 9437 TS	Lam Van Toan	Vietnam
28	KM. PKFB 423	Heng Peng Yu	Malaysia
29	JHF 5183 T	NURDIN	Malaysia
30	KM. TG 9583 TS	Pham Van Den	Vietnam
31	KM. TG 9489 TS	Le Van Hoang	Vietnam
32	KM. KF 5152	Zaw Tun	Vietnam
33	BV 99793 TS	Tran Tan Than	Vietnam
34	BV 97878 TS	Dinh Minh Chi	Vietnam
35	BT 95212 TS	Nguyen Thanh Duc	Vietnam

Pada tahun 2019 jumlah barang bukti yaitu jumlah kapal ikan asing dan Indonesia yang di proses penyidikan dan berkekuatan hukum tetap. Barang bukti tersebut antara lain 11 kapal Vietnam, 10 Kapal Malaysia, 1 Kapal Rusia dan 1 kapal

Indonesia. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat 7 kapal Malaysia dan 22 kapal Vietnam.

Pagu anggaran tahun 2020 untuk penanganan barang bukti tindak pidana kelautan dan perikanan lingkup PSDKP Batam sebesar Rp 162.000.000,- dan terserap sebesar Rp. 158.600.015,- atau 97,90%.

17) Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target (Kasus)	Capaian (Kasus)	Target (%)	Capaian (%)	%
IKU17	Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam	28	28	93	100	107,53

Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam diukur dengan membandingkan antara jumlah awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani sampai dengan penyerahan tahap II ke JPU (Jaksa Penuntut Umum) dengan jumlah awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang terjadi sampai dengan 1 bulan sebelum bulan berjalan yang telah diterbitkan SPDP dan SPRINDIK. Terdapat 283 Awak Kapal Asing dan Indonesia yang ditangani Pangkalan PSDKP Batam dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 11. Daftar Awak Kapal di Pangkalan PSDKP Batam

No	Nama Kapal	Jumlah Awak Kapal	Kebangsaan Awak Kapal
1	KM. KG 94376 TS	21 (Dua Puluh Satu)	Vietnam
2	KM. KG 95786 TS	16 (Enam Belas)	Vietnam
3	KM. PAF 4837	20 (Dua Puluh)	Vietnam
4	KM. PAF 4696	6 (Enam)	Vietnam

5	KM. KG 94654 TS	6 (Enam)	Vietnam
6	KM. PKFB 422	5 (Lima)	Myanmar
7	KM. KG 93811 TS	17 (Tujuh Belas)	Vietnam
8	KM. KG 93012 TS	5 (Lima)	Vietnam
9	KM. BV 92475 TS	3 (Tiga)	Vietnam
10	KM. BV 93128 TS	3 (Tiga)	Vietnam
11	KM. PK 3853 F	4 (Empat)	Myanmar
12	KM. SLFA 2030	5 (Lima)	Myanmar
13	KM. SLFA 4429	5 (Lima)	Myanmar
14	KM. BD 30942 TS	6 (Enam)	Vietnam
15	KM. BD 30919 TS	6 (Enam)	Vietnam
16	KM. KG 94094 TS	17 (Tujuh Belas)	Vietnam
17	KM. KG 90746 TS	5 (Lima)	Vietnam
18	KM. PKFA 8777	5 (Lima)	Myanmar
19	KM. KG 95551 TS	14 (Empat Belas)	Vietnam
20	KM. KG 95572 TS	6 (Enam)	Vietnam
21	KM. TG 9481 TS	17 (Tujuh Belas)	Vietnam
22	KM. TG 9437 TS	17 (Tujuh Belas)	Vietnam
23	KM. PKFB 423	5 (Lima)	Malaysia dan Indonesia
24	JHF 5183 T	5 (Lima)	Malaysia dan Indonesia
25	KM. TG 9583 TS	20 (Dua Puluh)	Vietnam
26	KM. TG 9489 TS	5 (Lima)	Vietnam
27	KM. KF 5152	4 (Empat)	Myanmar dan Indonesia
28	BV 99793 TS	22 (Dua Puluh Dua)	Vietnam
29	BV 97878 TS	3 (Tiga)	Vietnam
30	BT 95212 TS	10 (Sepuluh)	Vietnam

Tahun 2019 awak kapal yang termasuk dalam perhitungan Indikator adalah Nahkoda dan/atau Kepala Kamar Mesin (KKM) yang menjadi tersangka. Jumlah tersangka pada tahun 2019 sebanyak 29 tersangka.

Pada tahun 2020 pagu anggaran untuk penyelesaian Penanganan Awak Kapal Tindak pidana Kelautan dan Perikanan lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam sebesar Rp. 262.500.000,- kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 727.900.000,- dan sudah terealisasi sebesar Rp. 724.798.600,- atau 99,57%.

Evaluasi dan analisis pada IKU18, IKU19, IKU20, IKU21, IKU22, IKU23, IKU24, IKU25 dan IKU26 diuraikan sebagai **Sasaran Strategis 15 (Tata kelola pemerintahan yang baik)** yaitu:

18) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU18	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	-	87,33	80	87,08	108,85

Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan adalah 80 dan ditetapkan sebagai target tahunan. Untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna SLO dilakukan survey sebanyak dua kali, yaitu pada semester I dan semester II. Nilai akhirnya yaitu rata-rata dari dua nilai pelaksanaan IKM. Pada semester I di Pangkalan PSDKP Batam telah dilakukan pada bulan Juni dan mendapat nilai 86,09 dengan jumlah responden sebanyak 230 orang Kemudian kegiatan IKM dilaksanakan triwulanan. Triwulan III dilakukan survey terhadap 240 orang responden dengan indeks 87,75 dan triwulan IV survey terhadap 190 orang

responden dengan indeks 87,40. Indeks Kepuasan Masyarakat di Pangkalan PSDKP Batam pada tahun 2020 yaitu sebesar 87,08 yang merupakan rata-rata dari indeks pada semester I, Triwulan III dan Triwulan IV tahun 2020. Pada semester II tahun 2020 kegiatan IKM diubah menjadi triwulanan untuk mempercepat tindak lanjut kekurangan pada IKM sebelumnya sehingga pelayanan akan semakin baik. Pada tahun 2020 pagu anggaran IKM sebesar Rp. 43.742.000,-. kemudian dilaksanakan revisi menjadi Rp. 53.876.000,-. Dari pagu tersebut terealisasi sebesar 91,90% atau Rp. 49.513.042,-

Pada tahun 2019 tidak terdapat indikator kinerja “*Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan*”. Tahun 2019 semester I nilai IKM Pangkalan PSDKP Batam adalah 86,75 dan semester II adalah 87,90.

19) Presentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU19	Presentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	100	100	100	100,00

Presentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 100%. Layanan Dukungan Manajemen Satker merupakan salah satu sub output dari Output Layanan Dukungan Manajemen Satker yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

- a) Dukungan penyusunan rencana program dan rencana anggaran;
- b) Dukungan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- c) Dukungan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;

- d) Dukungan pengelolaan kepegawaian;
- e) Dukungan Pelayanan umum, Pelayanan rumah tangga dan perlengkapan.

Kegiatan penyusunan program dan rencana anggaran sebagian masih belum dilaksanakan yaitu kegiatan Rapat Teknis Perencanaan dan Finalisasi untuk anggaran tahun 2021. Selain itu kegiatan penyusunan Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan masih belum dilaksanakan. Karena kegiatan-kegiatan diadakan oleh kantor pusat yang kemudian mengundang satker-sakter.

Adapun pagu anggaran tahun 2020 untuk Layanan Dukungan Manajemen Satker sebesar Rp. 910.748.000,-. Realisasi tahun 2020 sebesar Rp. 683.473.999,- atau 75,05%. Realisasi tersebut berupa perjalanan dinas pegawai dan belanja bahan terkait penyusunan rencana program dan rencana anggaran, pemantauan dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan perbendaharaan, pengelolaan kepegawaian, pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan.

20) Presentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU20	Presentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	100	100	100	100,00

Presentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 100%. Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal merupakan salah satu sub output dari Output Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang terdiri dari 3 (tiga) komponen, yaitu:

- a) Realisasi pengadaan kendaraan bermotor;
- b) Realisasi pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; dan
- c) Realisasi pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Pada tahun 2019 tidak terdapat indikator “*Presentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Batam*”. Kegiatan pada tahun tersebut untuk Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Batam tercapai 100%.

Adapun kegiatan tahun 2020 adalah pengadaan kendaraan bermotor berupa mobil pengangkut ABK *non justicia*, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran sudah terlaksana pada semester I tahun 2020. Untuk pagu anggaran tahun 2020 untuk Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal sebesar Rp. 536.403.000,-. Realisasi pada tahun 2020 sebesar Rp. 536.305.795,- atau 99,98%.

21) Presentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU21	Presentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	100	100	100	100,00

Presentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Batam adalah 100%. Layanan Perkantoran merupakan salah satu Sub Output dan Output Layanan Perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Batam yang terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu :

- a) Realisasi Gaji dan Tunjangan lingkup Satker
- b) Realisasi Operasional dan Pemeliharaan Kantor lingkup Satker

Pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai serta operasional dan pemeliharaan kantor lingkup Pangkalan PSDKP Batam terlaksana setiap pada bulannya. Adapun pagu anggaran tahun 2020 untuk Layanan Perkantoran sebesar Rp. 15.341.485.000,-. Kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 15.403.080.000,-. Pada tahun 2020 terealisasi sebesar Rp. 15.094.774.315,- atau 98,00%. Realisasi tersebut yaitu layanan pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam dan layanan operasional dan pemeliharaan kantor lingkup Pangkalan PSDKP Batam.

22) Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU22	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam	-	-	75	83,28	111,04

Target Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam tahun 2020 adalah 75 dan tercapai 83,28. WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/kawasan yang memenuhi sebagian besar komponen penilaian yang meliputi manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja sesuai dengan PERMEN PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMEN PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan jika dinilai melalui penilaian mandiri berdasarkan Permen KP Nomor: 62/PERMEN-KP/2017 Tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju

WBK/WBBM di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Unit kerja yang ditetapkan sebagai Menuju WBK dengan kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,50, dengan nilai sub komponen Survei Persepsi Anti Korupsi minimal 13,5 dan sub komponen Persentasi TLHP minimal 5,0.
4. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat” minimal 15.

Selanjutnya, penetapan unit kerja berpredikat Menuju WBK akan dituangkan dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Kegiatan penyusunan dokumen ZI dilakukan selama dua tahun terakhir, yaitu 2019 dan 2020. Pada tahun 2019 belum dilakukan penilaian, hanya dilakukan pengumpulan kelengkapan dokumen untuk memenuhi komponen penilaian ZI. Pada tahun 2020 semester I dilakukan penampungan pada masing-masing kelompok kerja pembangunan Zona Integritas Pangkalan PSDKP Batam oleh Sekretariat Jenderal PSDKP dan Inspektorat Jenderal II Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian pada semester II dilakukan penilaian oleh Inspektorat Jenderal V Kementerian Kelautan dan Perikanan dan mendapat nilai 83,28 dengan rincian pada gambar 4 berikut.

ID SATKER/LEVEL
Unit Organisasi
Nama Satuan Kerja
Alamat Kantor

60 / WBK / PEMBANGUNAN UNIT ZI BARU
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SDKP
PANGKALAN PSDKP BATAM
JALAN TRANS BARELANG JEMBATAN II PULAU NIPAH KEL. SETOKOK
KEC. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELP. (0778) 4091708

WBK

WBBM

TIM ASESOR

PELAKSANAAN ASESMEN

A. KOMPONEN PROSES/PENGUNGKIT	Bobot Nilai	Bobot WBK (60% x Bobot)	Bobot WBBM (75% x Bobot)	Capaian Nilai	Persentase (%)	Keterangan Status
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	8.00	4.80	6.00	5.76	72.00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
2. PENATAAN TATA LAKSANA	7.00	4.20	5.25	5.11	73.00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10.00	6.00	7.50	8.44	84.40	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	10.00	6.00	7.50	7.16	71.60	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
5. PENGUATAN PENGAWASAN	15.00	9.00	11.25	11.25	75.00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10.00	6.00	7.50	7.62	76.20	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
NILAI	60.00	36.50	45.00	45.34		
B. KOMPONEN HASIL						
1. TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN	20.00	18.50	18.50	19.29	96.45	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
a. NILAI SURVEI PERSEPSI KORUPSI (SURVEI EKSTERNAL)	15.00	13.50	13.50	14.29	95.27	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
b. PERSENTASE TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN (INTERNAL DAN EKSTERNAL) YANG DITINDAKLANJUTI	5.00	5.00	5.00	5.00	100.00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
2. TERWUJUDNYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT	20.00	16.00	18.00	18.65	93.25	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
NILAI	40.00	34.50	36.50	37.94		
C. PEMENUHAN LHKPN DAN LHKASN						
1. LHKPN YANG DISAMPAIKAN KE KPK OLEH PENYELENGGARA NEGARA	100.00	100.00	100.00	20	100.00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
2. LHKASN YANG DISAMPAIKAN MELALUI APLIKASI SIHARKA OLEH PNS	100.00	100.00	100.00	65	100.00	MEMENUHI SYARAT PENILAIAN WBK DAN WBBM
NILAI	100.00	70.50	81.50	83.28		

Gambar 4. Nilai Zona Integritas Pangkalan PSDKP Batam

Pagu anggaran untuk pembangunan serta monev pembangunan zona integritas (ZI) sebesar Rp. 24.680.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp. 17.115.000,- atau 69,35%.

23) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU23	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	71	71	72	73,3	101,81

Penetapan Kinerja Tahun 2020 Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam adalah 72 dan ditetapkan sebagai target tahunan. Capaian Indeks profesional ASN Pangkalan PSDKP Batam sebesar 73,3. Nilai diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ Kualifikasi yaitu yang berkenaan dengan tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman

Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP, ⁽²⁾ Kompetensi yaitu yang berkenaan dengan keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon), ⁽³⁾ Kinerja yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP) dan ⁽⁴⁾ Disiplin yaitu berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin dan dapat dilihat pada gambar 5 berikut.

17

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai Yang Diteliti	Kualifikasi (Bobot 25)		Kompetensi (Bobot 40)		Kinerja (Bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)		TOTAL	Keterangan
			IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase	IP	Presentase		
1	SEKRETARIAT DITEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	57	14,04	24,63 %	31,08	77,7 %	25	85,00 %	4,54	90,8 %	75,07	SEDANG
2	DIREKTORAT PENANTAUAN DAN ORBASI ARRADA	152	11,22	44,88 %	27,34	89,85 %	24,74	82,47 %	4,95	99 %	88,85	RENDAH
3	PANGKALAN PSDKP LAMPUNG	30	13,4	51,5 %	21,85	79,67 %	25	83,33 %	4,92	98,4 %	75,17	SEDANG
4	PANGKALAN PSDKP BATAM	95	11,71	46,84 %	31,68	79,3 %	25	83,33 %	4,92	98,4 %	75,3	SEDANG
5	PANGKALAN PSDKP JAKARTA	73	13,22	52,88 %	30,03	75,98 %	25,21	94,02 %	5	100 %	73,46	SEDANG
6	PANGKALAN PSDKP BENDU	64	12,89	51,58 %	24,02	80,06 %	24,38	81,27 %	4,95	99 %	68,24	RENDAH
7	PANGKALAN PSDKP SITUNG	102	12,32	50,58 %	33,3	82 %	34,67	82,25 %	5	100 %	75,4	SEDANG
8	PANGKALAN PSDKP TUAL	96	12,03	48,12 %	34,8	82 %	25	83,33 %	5	100 %	78,84	SEDANG
9	STASIUN PSDKP CLACAR	70	12	48 %	31,29	85,22 %	25	83,33 %	4,97	99,4 %	73,26	SEDANG
10	STASIUN PSDKP BELAWAN	68	12,27	48,08 %	34,28	85,65 %	25	83,33 %	4,95	99 %	82,48	SEDANG
11	STASIUN PSDKP KURANG	44	12,27	48,08 %	30,28	75,7 %	23,11	83,7 %	5	100 %	72,67	SEDANG
12	STASIUN PSDKP PONTIANAK	63	11,16	44,64 %	35,76	89,4 %	25	83,33 %	4,95	99 %	76,87	SEDANG
13	STASIUN PSDKP TARKANAN	42	11,9	47,5 %	30,48	76,2 %	25	83,33 %	5	100 %	72,68	SEDANG
14	STASIUN PSDKP TAHUNA	33	10,78	40,54 %	34,62	89,55 %	24,27	80,9 %	5	100 %	74,65	SEDANG
15	STASIUN PSDKP AMBON	38	11,45	43,8 %	32,37	85,18 %	24,74	82,47 %	5	100 %	73,55	SEDANG
16	STASIUN PSDKP SAKI	41	11,83	47,39 %	34,77	81,83 %	23,83	79,77 %	5	100 %	77,42	SEDANG
17	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN	36	16,81	67,34 %	26,53	66,33 %	24,33	81,1 %	5	100 %	72,67	SEDANG
18	DIREKTORAT PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN	41	17,32	69,28 %	25,23	59,07 %	24,96	82,2 %	4,8	96 %	73,01	RENDAH
19	DIREKTORAT PENANGKARAH PELANGGARAN	27	16,08	64,32 %	35,07	87,67 %	25	83,33 %	4,92	98,4 %	81,07	TINGGI

Gambar 5. Indeks IP ASN UPT Ditjen PSDKP

Pada tahun 2019 target dan capaian Indeks profesional ASN Pangklana PSDKP Batam sebesar 71. Namun pada tahun 2020 ada penambahan target menjadi 72 dengan capaian sebesar 73,3 yang termasuk dalam katagori “Sedang”.

Adapun anggaran tahun 2020 untuk Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pengelolaan kepegawaian sebesar Rp. 103.500.000,-. Kemudian direvisi menjadi Rp. 38.000.000,- Sampai dengan tahun 2020 anggaran yang dapat terserap sebesar Rp 16.643.100,- atau 43,80%.

24) Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU24	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam	-	91,39	90	94,65	105,17

Rekonsiliasi adalah rangkaian catatan informasi yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan informasi. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Batam adalah 90 dan ditetapkan sebagai target tahunan. Kemudian capaian pada tahun 2020 sebesar 94,65. Rekonsiliasi kinerja merupakan sebarang verifikasi dalam bentuk proses pencocokan data kinerja dengan catatan informasi terkait pelaporan kinerja. Rekonsiliasi kinerja di lingkungan KKP dinilai dari 3 aspek, yaitu:

a. Aspek kepatuhan

Aspek ini dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja. Nilai kepatuhan diperoleh dari membandingkan dokumen yang tersedia dengan dokumen yang dibutuhkan. Nilai kepatuhan akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang dibutuhkan tersedia. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kepatuhan, antara lain:

- 1). Perjanjian Kinerja;
- 2). Manual IKU;
- 3). Rincian Target IKU;
- 4). Rencana Akasi;
- 5). LKj/LCK; dan
- 6). Data dukung LKj/LCK.

b. Aspek kesesuaian

Aspek ini dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nilai kesesuaian diperoleh dari membandingkan nilai kriteria dokumen yang disandingkan dengan total dokumen yang disandingkan. Nilai kesesuaian akan bernilai 30 apabila seluruh dokumen yang disandingkan sama dan sesuai. Untuk dokumen yang dibutuhkan pada aspek kesesuaian, yaitu:

➤ Kriteria dokumen yang disandingkan:

1. PK – LKj/LCK;
2. LKj/LCK – Kinerja; dan
3. PK – Kinerja.

➤ Realisasi:

1. LKj/LCK TW I – Kinerja;
2. LKj/LCK TW II – Kinerja; dan
3. LKj/LCK TW III – Kinerja.

➤ Informasi data:

1. Manual IKU – Kinerja; dan
2. Rincian Target IKU – Kinerja

c. Aspek ketercapaian

Aspek ini dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerja). Nilai ketercapaian diperoleh dari membandingkan Rata-rata NPSS triwulan dibagi dengan 120. Nilai ketercapaian akan bernilai 40 apabila rata-rata NPSS triwulan bernilai maksimal atau 120 dengan rincian pada gambar 6 berikut.

KERTAS KERJA REKONSILIASI KINERJA TAHUN 2020									
NAMA UNIT KERJA ES.1		Direktoral Jenderal PSDKP							
NAMA UNIT BERSANGKUTAN		Pangkalan PSDKP Batam							
LEVEL		2							
KODE USER KINERJAKU		0602200000							
TANGGAL REKON		Selasa, 10 November 2020							
ASPEK KEPATUHAN		PK	Manual IKU*	Rinolan Target IKU	Renoana Akel	LKJ / LOK			Data Dukung LKJ/LOK Tw III*
						Tw I	Tw II	Tw III	
		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,91
		98,86							
Skor Catatan		(...jika ada...)	(...jika ada...)	Catatan: Format tidak sesuai dengan Permawak 69/2017	(...jika ada...)	Catatan: Format tidak sesuai dengan Permawak 53/2014	(...jika ada...)	(...jika ada...)	
ASPEK KESesuaian		DATA DAN INFORMASI				TARGET			REALISASI
		PK - Manual IKU	PK - Rinolan Target	PK - Renoana Akel	Rinolan Target IKU - Kinerja	PK - LKJ/LOK Tw III	PK - Kinerja	LKJ/LOK Tw III - Kinerja	LKJ/LOK Tw III - Kinerja
		1,00	1,00	1,00	0,96	1,00	1,00	0,96	0,96
		98,56							
Skor Catatan		(...jika ada...)	(...jika ada...)	(...jika ada...)	(...jika ada...)	Catatan: Penanganan pada manual IKU tidak sesuai uraian pada 1%	(...jika ada...)	(...jika ada...)	
ASPEK KETERCAPAIAN		NPSS 2020							
		Tw I	Tw II	Tw III					
		100,01	109,78	109,05					
		106,28							
Skor Catatan		(...jika ada...)	(...jika ada...)	(...jika ada...)					
SKOR		ASPEK PENILAIAN							
		KEPATUHAN	KESEsuaIAN	KETERCAPAIAN					
		30%	30%	40%					
		98,86	98,56	106,28					
		29,66	29,57	35,43					
		94,65							
Bobot									
Skor per aspek									
Skor dikali Bobot									
Total skor									

Gambar 6. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Batam

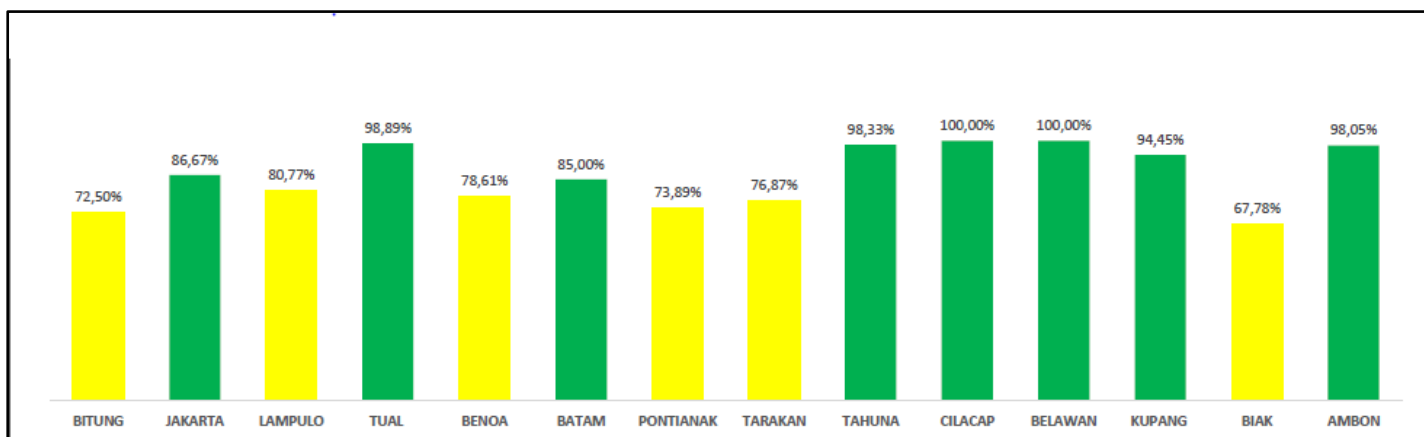
Tahun 2019 tidak terdapat indikator “*Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam*”. Namun pada dilakukan penilaian dengan nilai total 91,39. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat peningkatan nilai menjadi 94,65. Peningkatan ini terjadi karena nilai pada dua aspek penilaian mengalami kenaikan. Aspek kepatuhan pada tahun 2019 sebesar 29,41 dan tahun 2020 menjadi 29,66. Aspek kesesuaian tahun 2019 sebesar 25,66 dan tahun 2020 sebesar 29,57.

Pada tahun 2020 pagu anggaran untuk Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam yaitu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebesar Rp. 148.550.000,- dengan realiasi anggaran sebesar Rp. 142.271.740,- atau 95,77%.

25) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU25	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80	86,67	82	85	103,66

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar diperoleh dari komponen pembentuk yaitu ⁽¹⁾ dokumen yang terdiri dari Renstra 2020-2024, Dokumen Perjanjian Kinerja (Level 3 dan 4), Manual IKU, Rencana Aksi dan Laporan Kinerja. ⁽²⁾ keikutsertaan pada aplikasi bitrix24 (Level 3 dan 4) dan ⁽³⁾ keaktifan pada aplikasi bitrix24 (Level 3, 4 dan staf). Sampai dengan Tahun 2020, persentase sistem manajemen pengetahuan yang terstandar adalah 85% dan dapat dilihat pada gambar 7 berikut.



Gambar 7. Grafik MP UPT. Ditjen PSDKP

Tahun 2019 target Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sebesar 80 dengan capaian 86,67. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat penambahan target menjadi 82 dengan capaian 85. Selain pimpinan di UPT, operator aplikasi *bitrix24* juga berada di Satwas lingkup Pangkalan PSDKP Batam. Satwas-satwas tersebut yaitu Satwas SDKP Bangka, Belitung, Palembang, Natuna, Tanjungpinang dan Anambas.

Pada tahun 2020 pagu anggaran untuk menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup UPT Pangkalan PSDKP Batam yaitu publikasi dan dokumentasi Ditjen PSDKP sebesar Rp. 18.000.000,- kemudian diladakan revisi menjadi Rp. 22.831.000,- dengan realiasi anggaran Rp. 14.155.000,- atau 62,00%.

26) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam

Indikator Kinerja Utama		2019		2020		
Kode	Uraian	Target	Capaian	Target	Capaian	%
IKU26	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam	87	92,49	88	94,06	106,82

Penetapan Kinerja Tahun 2020 pada Nilai kinerja anggaran Pangkalan PSDKP Batam adalah 88 (Baik). Nilai Kinerja pelaksanaan anggaran adalah proses evaluasi dan spending review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga dalam rangka ketahanan fiskal dan ekonomi dengan berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) pada fitur Monev PA aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan. adapun indikatornya yaitu ⁽¹⁾ Revisi DIPA, ⁽²⁾ Deviasi DIPA ⁽³⁾ Pengelolaan UP, ⁽⁴⁾ LPj Bendahara, ⁽⁵⁾ Data Kontrak, ⁽⁶⁾ Penyelesaian Tagihan, ⁽⁷⁾ Penyerapan Anggaran Tahun 2020 adalah Rp. 52.405.056.179,- atau 97,41% dari Pagu Anggaran Rp. 92.341.143.000,- yang direvisi menjadi Rp. 53.799.214.000,- ⁽⁸⁾ Retur SP2D, ⁽⁹⁾ Perencanaan Kas, ⁽¹⁰⁾ Pengembalian SPM, ⁽¹¹⁾ Dispensasi SPM dan ⁽¹²⁾ Pagu Minus.

01 Revisi DIPA (1) Target Revisi DIPA 5%	02 Halaman III DIPA (2) Target Halaman III DIPA 5%	03 Pengelolaan UP (3) Target Pengelolaan UP 10%	04 Rekam LPj Bendahara (4) Target Rekam LPj Bendahara 5%	05 Data Kontrak (5) Target Data Kontrak 10%	06 Penyelesaian Tagihan (6) Target Penyelesaian Tagihan 20%
07 Penyerapan Anggaran (7) Target Penyerapan Anggaran 20%	08 Retur SP2D (8) Target Retur SP2D 5%	09 Perencanaan Kas (9) Target Perencanaan Kas 5%	10 Pengembalian SPM (10) Target Pengembalian SPM 5%	11 Dispensasi Penyampaian SPM (11) Target Dispensasi Penyampaian SPM 5%	12 Pagu Minus (12) Target Pagu Minus 5%

Gambar 8. Formula Penilaian IKPA Tahun 2020

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2020 adalah 94,06%. Dalam meningkatkan nilai IKPA di tahun 2020 perlu dilakukan revisi halaman III DIPA sebagai salah satu indikator penilaian IKPA Pangkalan PSDKP Batam dengan rincian pada gambar 9 berikut.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN																				
Sampai Dengan : DESEMBER																				
No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kesesuaian Perencanaan dengan Pelaksanaan			Kepatuhan Terhadap Regulasi				Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan				Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
					Revisi DIPA	Deviasi Halaman II DIPA	Pagu Minus	Data Kontrak	Pengelolaan UP dan TUP	LPJ Bendahara	Dispensasi SPM	Penyerapan Anggaran	Penyelesaian Tagihan	Konfirmasi Capaian Output	Retur SP2D	Rankas	Kesalahan SPM			
1	137	325156	PANGKALAN PSDKP BATAM	Nilai	100.00	56.38	100.00	100.00	96.00	83.00	100.00	95.66	96.77	94.24	99.66	100.00	95.00	94.06	100%	94.06
				Bobot	5	5	5	15	8	5	5	15	12	10	5	5	5			
				Nilai Akhir	0.00	2.92	5.00	15.00	7.64	4.15	5.00	14.38	11.61	8.42	4.98	5.00	4.75			
				Nilai Aspek	88.12			95.25				94.14				97.50				

Gambar 9. Capaian IKPA Pangkalan SDKP Batam

Tahun 2019 target Nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Batam sebesar 87 dengan capaian 92,49. Sedangkan pada tahun 2020 terdapat perubahan target menjadi 88 dengan capaian 94,06.

Adapun anggaran tahun 2020 untuk kinerja pelaksanaan anggaran Lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Batam yaitu pengelolaan keuangan dan perbendaharaan sebesar Rp. 74.572.000,-. Kemudian diadakan revisi menjadi Rp. 59.000.000,-. Selama tahun 2020 anggaran yang dapat terserap sebesar Rp. 21.234.305,- atau 35,99%.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA. 2020 sebesar Rp. 92.341.143.000,-. Kemudian direvisi menjadi Rp. 53.799.214.000,- Realisasi Tahun 2020 sebesar Rp. 52.405.056.179,- atau sebesar 97,41 %. Rincian realisasi

anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 11 berikut.

Tabel 12. Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2020

No	Kode	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi	
				(Rp)	%
1	2350	Pemantauan dan Operasi Armada	34.374.048.000,00	33.702.582.565,00	98,05
2	2351	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.641.590.000,00	1.595.250.300,00	97,18
3	2352	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	406.900.000,00	352.298.000,00	86,58
4	2353	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	526.445.000,00	451.853.965,00	85,83
5	2355	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	16.850.231.000,00	16.303.071.349,00	96,75
TOTAL			53.799.214.000,00	52.405.056.179,00	97,41

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan tabel diatas, realisasi tertinggi terdapat pada kegiatan **“Pemantauan dan Operasi Armada (2350)”** sebesar 98,05%. Anggaran dan realisasi terbesar pada output pembangunan kapal pengawas (2350.007). sedangkan untuk realisasi terendah pada **“Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353)”** sebesar 85,91%. Rata-rata realisasi output pada kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan adalah 80%. Hanya satu output yang mencapai 94,03% yaitu Pengawasan Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan.

Kemudian untuk efisiensi penggunaan anggaran pada masing-masing sasaran strategis secara umum mencapai 99%. Nilai tertinggi pada Sasaran Strategis 1 **“Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat”** sebesar 99,66%, hal tersebut didasarkan atas pencapaian SS mencapai 100% sedangkan realisasi anggaran mencapai 40,64%. Nilai terendah pada Sasaran Strategis 7 **“Terselenggaranya pembangunan kapal pengawas”** sebesar 99,01%, yang

didasarkan atas pencapaian SS sebesar 59%, sedangkan realisasi anggaran sebesar 98,57% dengan rincian pada tabel 13 berikut.

.Tabel 13. Efisiensi Anggaran Pangkalan PSDKP Batam TA 2020

SS	Jumlah IKU	Capaian SS	Anggaran (Rp)	Tahun 2020		Efisiensi Anggaran
				Realisasi (Rp)	%	
SS1	1	120	12.600.000	5.120.800	40,64	99,66
SS2	1	111	406.900.000	352.298.000	86,58	99,23
SS3	1	100	526.445.000	451.853.965	85,83	99,14
SS4	1	120	11.714.831.000	11.554.834.943	98,63	99,18
SS5	1	120	1.610.140.000	1.550.966.865	96,32	99,20
SS6	1	120	93.000.000	89.770.967	96,53	99,20
SS7	1	100	16.209.918.000	15.977.962.570	98,57	99,01
SS8	1	100	3.487.548.000	3.360.690.650	96,36	99,04
SS9	1	100	864.905.000	789.570.770	91,29	99,09
SS10	2	110	23.429.662.000	23.109.669.886	98,63	99,10
SS11	2	110	3.220.280.000	3101933730	96,32	99,12
SS12	1	100	48.600.000	45.900.000	94,44	99,06
SS13	1	100	751.690.000	711.851.685	94,70	99,05
SS14	2	107	889.900.000	870.451.700	97,81	99,09
SS15	9	103	17.197.168.000	16.575.486.296	96,38	99,06

Ket: Efisiensi=((Capaian SS x Anggaran)-Realisasi Anggaran)/(Capaian SS x Anggaran)x100)

BAB IV PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan PSDKP Batam Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan capaian strategis Pangkalan PSDKP Batam yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisis dan evaluasi sebagai bahan analisis dan evaluasi lebih lanjut untuk menilai keberhasilan dalam satu periode Renstra yang berkesinambungan.
2. Hasil capaian kinerja sasaran pengawasan SDKP tahun 2020 mencapai dengan target yang diperjanjikan, akan tetapi terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang perlu menjadi perhatian, yaitu belum optimalnya pengendalian kegiatan terhadap perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam pencapaian target yang ditetapkan;

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi atas kinerja Pangkalan PSDKP Batam tahun 2020, sebagai upaya peningkatan kinerja pada periode selanjutnya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti sebagai berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	Percepatan penyelesaian penghitungan Indikator Kinerja	Memonitoring setiap triwulan oleh masing-masing kelompok sehingga mempermudah dalam pengolahan dan rekapitulasi data
2	Peningkatan monitoring dan evaluasi kinerja secara reguler	Melaksanakan rapat pengendalian yang melibatkan pimpinan setiap triwulan untuk mengawal pencapaian Kinerja

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16
BATAM 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON : (021) 3519070 (LACAK) FAKSMILE : (021) 3520346
WEBSITE : www.djpsdkp.kkp.go.id EMAIL : ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Salman Mokoginta**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Batam

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Batam, November 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

TB. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam

Salman Mokoginta

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BATAM

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam [pelaku usaha]	51
3.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	1,14
5.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	0,168
6.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
7.	Terselenggaranya pembangunan kapal pengawas	7. Jumlah kapal pengawas yang dibangun lingkup Pangkalan PSDKP Batam (unit)	1
8.	Terselenggaranya perawatan kapal pengawas	8. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam (unit)	3
9.	Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas	9. Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam (unit)	13
10.	Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas	10. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	240
		11. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam (hari operasi)	110
11.	Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas	12. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	95
		13. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam (hari operasi)	25
12.	Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan	14. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Batam (orang)	35

"bekerja dengan integritas dan totalitas"

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
13.	Terselenggaranya Penyidikan TPKP	15. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
14.	Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	16. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	93
		17. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	93
15.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Direktorat Pengawasan Sumber Daya Perikanan	18. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan Pangkalan PSDKP Batam [Indeks]	80
		19. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		20. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		21. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	100
		22. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	75
		23. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam [Indeks]	72
		24. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Batam (nilai)	90
		25. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup [%]	82
		26. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Batam	Baik [88]

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan dan Operasi Armada	34.374.048.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	1.641.590.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	406.900.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	526.445.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	16.850.231.000
Total Anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Batam		53.799.214.000

Batam, November 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



TB. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Batam



Salman Mokoginta

RENSTRA 2020-2024

SASARAN STRATEGIS (SS) DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		TARGET				
		2020	2021	2022	2023	2024
<i>Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas (SS1)</i>						
IKU1	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Batam (%)	70	75	80	90	100
<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan (SS2)</i>						
IKU2	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam	51	55	60	65	75
<i>Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan (SS3)</i>						
IKU3	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100	100	100
<i>Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Kapal Pengawas (SS4)</i>						
IKU4	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam	1,14	1,20	1,35	1,42	1,55
<i>Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat (SS5)</i>						
IKU5	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam	0,168	0,281	0,374	0,412	0,502
<i>Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SS6)</i>						
IKU6	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP	70	75	80	90	100
<i>Terselenggaranya pembangunan Kapal Pengawas (SS7)</i>						
IKU7	Jumlah Kapal Pengawas yang dibangun lingkup Pangkalan PSDKP Batam	1	-	-	-	-
<i>Terselenggaranya perawatan kapal pengawas (SS8)</i>						
IKU8	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam	3	3	3	3	3
<i>Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas (SS9)</i>						
IKU9	Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Batam	13	13	13	13	13
<i>Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas (SS10)</i>						
IKU10	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas	240	260	280	290	300
IKU11	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP – NRI Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	117	110	110	110	110
<i>Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas (SS11)</i>						
IKU12	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Batam	95	100	120	150	200
IKU13	Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Batam	25	25	25	25	25

<i>Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan (SS12)</i>						
IKU14	Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	34	34	34	34	34
<i>Terselenggaranya Penyidikan TPKP (SS13)</i>						
IKU15	Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100	100	100
<i>Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal (SS14)</i>						
IKU16	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Batam	93	100	100	100	100
IKU17	Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Batam	93	100	100	100	100
<i>Tata kelola pemerintahan yang baik (SS15)</i>						
IKU18	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Batam	80	81	82	83	85
IKU19	Presentase pemenuhan layanan dukungan manajemen satker lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100	100	100
IKU20	Presentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100	100	100
IKU21	Presentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Batam	100	100	100	100	100
IKU22	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Batam	75	75	75	75	75
IKU23	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Batam	72	72	72	72	72
IKU24	Nilai Rekonsiliasi Kinerja Lingkup Pangkalan PSDKP Batam	90	90	90	90	90
IKU25	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Batam	82	82	82	82	82
IKU26	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Batam	88	88	88	88	88